

laporan kinerja
**SEKRETARIAT
BRSDM**
Tahun 2023

Sekretariat Badan Riset dan SDM KP
Kementerian Kelautan dan Perikanan



laporan kinerja
**SEKRETARIAT
BRSDM**
Tahun 2023

Sekretariat Badan Riset dan SDM KP
Kementerian Kelautan dan Perikanan



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karena atas berkah dan rahmat- Nya, Laporan Kinerja Sekretariat BRSDM Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik sesuai rencana yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Sekretariat BRSDM Tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat BRSDM sampai dengan Tahun 2023, dengan mengacu pada standar sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang diemban Sekretariat BRSDM, laporan kinerja ini berfungsi sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BRSDM menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat sekaligus alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja. Selanjutnya, laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh atas capaian kinerja Sekretariat BRSDM Tahun 2023. Akhirnya, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas sumbangsih semua pihak yang turut mendukung pencapaian kinerja Sekretariat BRSDM

Jakarta, 15 Januari 2024

Sekretaris BRSDM,



Rudi Alex Wahyudin

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
Ringkasan Eksekutif	vi
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	3
B. Maksud dan Tujuan	4
C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
D. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)	5
E. Sistematika Laporan Kinerja	6
F. Isu Strategis	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis	8
B. Rencana Kerja Tahunan (RENJA) 2023	11
C. Perjanjian Kinerja (PK)	18
D. Pengukuran Kinerja	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Organisasi	26
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja	27
C. Akuntabilitas Keuangan	70
D. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya Sekretariat BRSDM	72
BAB III PENUTUP	75
A. Kesimpulan	76
B. Rekomendasi	78
Lampiran	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perubahan Indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BRSDM Per November 2023	9
Tabel 2. Rencana Kerja Tahunan (Renja) BPPSDM Tahun 2023	13
Tabel 3. Anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2023	18
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Sekretariat BRSDM Per November 2023	20
Tabel 5. Status Indeks Capaian IKU	22
Tabel 6. Capaian Kinerja Sekretariat BRSDM Tahun 2023	27
Tabel 7. Capaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDM (unit)	30
Tabel 8. Satuan Kerja Lingkup BPPSDM Berpredikat WBK Tahun 2017 – 2023	30
Tabel 9. Unit kerja yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK lingkungan BPPSDM (unit/Satker)	33
Tabel 10. Hasil Assistensi Pembangunan Zona Integrasi Wilayah Bebas Korupsi	34
Tabel 11. Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas BPPSDM (%)	35
Tabel 12. Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat BRSDM (indeks)	36
Tabel 13. Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM (nilai)	38
Tabel 14. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat BRSDM (Nilai)	39
Tabel 15. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM (nilai)	41
Tabel 16. Persentase Unit kerja Sekretariat BRSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	44
Tabel 17. Capaian Kinerja Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat	45

BRSDM (%)

Tabel 18. Capaian Kinerja Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM (%)	47
Tabel 19. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat BRSDM (nilai)	49
Tabel 20. Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat BRSDM (nilai)	50
Tabel 21. Capaian Kinerja Tingkat Kepatuhan BMN BPPSDM (%)	52
Tabel 22. Capaian Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPSDM (%)	53
Tabel 23. Capaian Kinerja Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPSDM (%)	55
Tabel 24. Capaian Kinerja Nilai PNBK BPPSDM (Rupiah Miliar)	57
Tabel 25. Capaian Kinerja Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup BPPSDM (orang)	59
Tabel 26. Capaian Kinerja Kerja Sama Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati (Kesepakatan)	60
Tabel 27. Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati (%)	61
Tabel 28. Capaian Kinerja Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Sekretariat BRSDM (%)	62
Tabel 29. Capaian Kinerja Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDM yang Ditangani (%)	64
Tabel 30. Capaian Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPPSDM (Nilai)	65
Tabel 31. Capaian Kinerja Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Sekretariat BRSDM tepat waktu (%)	67
Tabel 32. Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Sekretariat BRSDM tepat waktu (%)	68
Tabel 33. Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran Sekretariat BRSDM tepat waktu (%)	69

Tabel 34. Realisasi Anggaran Lingkup Sekretariat BRSDM Tahun 2023	71
Tabel 35. Capaian Kinerja Sekretariat BRSDM pada Masing-Masing Indikator Kinerja	76

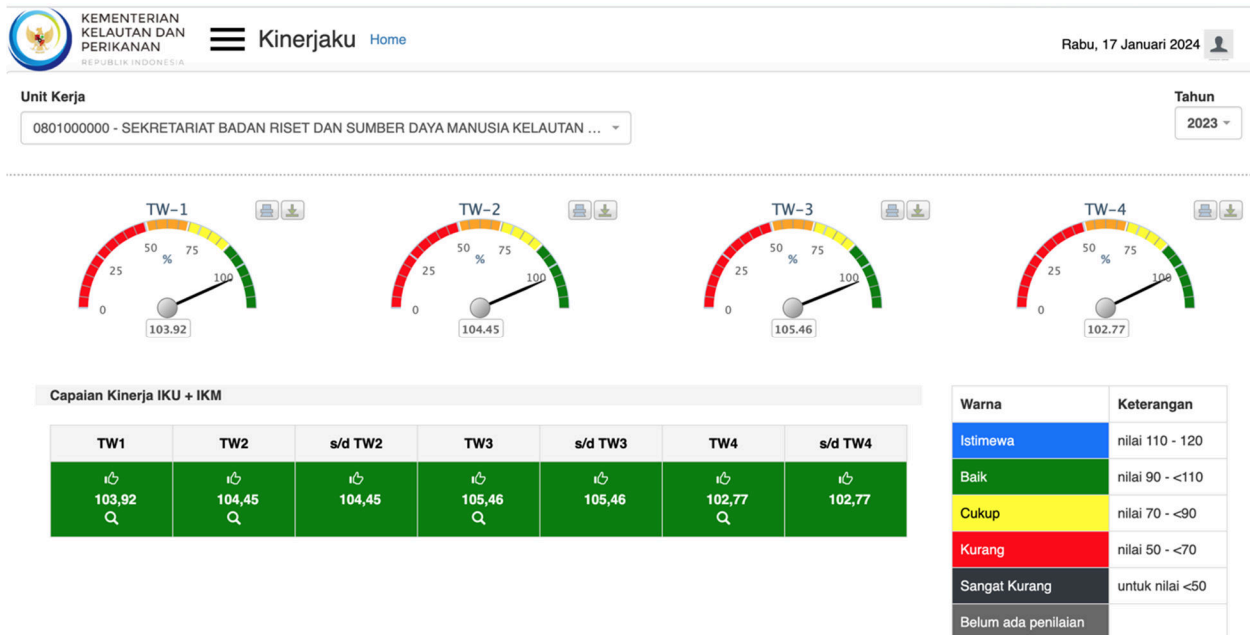
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Keragaan PNS Sekretariat BRSM Tahun 2023	4
Gambar 2. Capaian Kinerja Sekretariat BRSDM Tahun 2023	26
Gambar 3. Efisiensi Sekretariat BRSDM Tahun 2023 berdasar penggunaan sumberdaya	73

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja Sekretariat BRSDM Tahun 2023 disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan tujuannya, laporan ini ditunjukkan kepada pimpinan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta masyarakat luas sebagai informasi kinerja yang terukur serta upaya dalam menciptakan *good governance* dalam lingkup Sekretariat BRSDM maupun lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sekretariat BRSDM pada Tahun 2023 mengampu program dukungan manajemen yang didukung oleh kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPSDM yang terdiri atas 25 (dua puluh lima) IKU. Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, sebanyak 17 IKU berkinerja Baik (nilai 90 - < 110), dan 8 IKU berkinerja Istimewa (nilai 110 – 120). Sehingga Nilai Kinerja Organisasi yang didapatkan oleh Sekretariat BRSDM sebesar 102,77% atau berkategori baik berdasarkan *capture* aplikasi Kinerjaku sebagai berikut:



Capaian Kinerja Sekretariat BRSDM Tahun 2023

Capaian kinerja yang diperoleh Sekretariat BRSDM, merupakan hasil kerja kolektif dari seluruh pegawai Sekretariat BRSDM. Adapun capaian kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Sekretariat BRSDM KP Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		Tahun 2023		
				Target	Capaian	%
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BRSDM	1	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDM (unit)	15	16	106,67
		2	Unit kerja yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK Lingkungan BPPSDM (unit/Satker)	7	7	100
		3	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM (%)	≤0,5	0	120
		4	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Sekretariat BRSDM (indeks)	81	87,93	108,56
		5	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM (nilai)	80,5	84,33	104,76
		6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat BRSDM (Nilai)	93	95,94	103,16
		7	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM (nilai)	3,1	3,8	120
		8	Persentase Unit kerja Sekretariat BRSDM yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92	116,58	120
		9	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat BRSDM (%)	80	80,95	101,19
		10	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM (%)	75	81,52	108,69
		11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat BRSDM (nilai)	93,75	92,37	98,53

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		Tahun 2023		
				Target	Capaian	%
		12	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat BRSDM (nilai)	82	83,72	102,10
		13	Tingkat Kepatuhan BMN BPPSDM (%)	77,5	90,00	116,13
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPSDM (%)	77,5	88,00	113,55
		15	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPSDM (%)	100	100	100
		16	Nilai PNBP BPPSDM (Rupiah Miliar)	24,731	32,06	120
		17	Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup BPPSDM (orang)	12.342	12.519	101,43
		18	Kerja Sama Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati (Kesepakatan)	45	50	111,11
		19	Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati (%)	72	75,85	105,35
		20	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Sekretariat BRSDM (%)	100	100	100
		21	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDM yang Ditangani (%)	100	100	100
		22	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPPSDM (Nilai)	90	100	111,11
2	Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal Sekretariat BRSDM	23	Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Sekretariat BRSDM tepat waktu (%)	100	100	100
3	Terpenuhinya Layanan Perkantoran Sekretariat BRSDM	24	Persentase Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Sekretariat BRSDM tepat waktu (%)	100	100	100
		25	Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran Sekretariat BRSDM tepat waktu (%)	100	100	100

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa terdapat satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak mencapai target. IKU tersebut adalah Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat BRSDM. Hal ini dikarenakan rendahnya penilaian pada aspek deviasi halaman III DIPA. Kebutuhan dan dinamisasi organisasi yang cukup tinggi menjadi hambatan sehingga memerlukan dukungan anggaran yang berimplikasi atas deviasi halaman III DIPA serta penyelesaian tagihan kegiatan. Rekomendasi yang diberikan adalah perlu adanya sinergitas antara perencanaan dengan realisasi pada halaman III DIPA yang dikawal dan diawasi sejak anggaran Tahun berjalan ditetapkan. Hal ini untuk mengurangi terjadinya deviasi baik plus ataupun minus sehingga nilai deviasi IKPA dapat ditingkatkan nilainya pada Tahun 2024.



BAB I


PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai bentuk atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan kepada setiap entitas pelaporan wajib menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Sekretariat BRSDM sebagai entitas tersebut wajib membuat laporan keuangan dan kinerja yang didasari pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Lebih lanjut, akuntabilitas kinerja didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan - kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sejumlah peraturan perundang-undangan menjadi *guidance* bagi praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan *good governance* dan *clean government*, antara lain:

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- 
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan kinerja ini disusun dalam rangka pemenuhan kewajiban atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Melakukan perbaikan berkesinambungan bagi instansi guna pencapaian target tahunan.

C. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) mengalami perubahan kelembagaan pada tahun 2023 menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sedangkan kelembagaan Sekretariat Badan Riset dan SDM KP masih mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretariat BRSDM dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BRSDM. Sekretariat BRSDM mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di

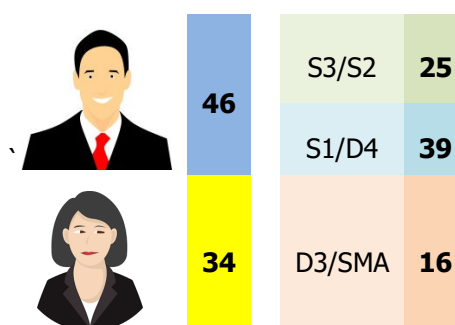
lingkungan badan. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menjalankan fungsi:

1. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan data dan kinerja, penyiapan bahan pimpinan, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
2. Koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitas pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. Koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
4. Koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
5. Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, barang milik negara dan ketatausahaan.

Susunan oganisasi Sekretariat Badan terdiri atas pimpinan dan kelompok jabatan fungsional.

D. KERAGAAN SUMBERDAYA MANUSIA (SDM)

Sekretariat BRSDM didukung oleh 121 personil yang terdiri atas 80 Pegawai Aparatur Sipil Negara (77 Pegawai Negeri Sipil, 1 Calon Pegawai Negeri Sipil dan 2 PPPK) dan 41 Tenaga Kontrak. Berdasarkan jenis kelamin, Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri dari 46 laki-laki dan 34 perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 25 orang berpendidikan S2/S3, 39 orang berpendidikan S1/D4, serta 16 orang berpendidikan D3/SMA (Data Kepegawaian, per Desember 2023)



Gambar 1. Keragaan PNS Sekretariat BRSDM Tahun 2023



E. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Sistematika laporan sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama tahun 2023.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang Sekretariat BRSDM seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di Sekretariat BRSDM.
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini uraian singkat tentang rencana strategis Sekretariat BRSDM 2020-2024, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja Sekretariat BRSDM tahun 2023 serta pengukuran kinerja.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, bab ini dijel;askan hasil capaian kinerja dari indicator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya.

5. **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

6. **Lampiran:**

- 1) Perjanjian Kinerja;
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu.



F. ISU STRATEGIS

Sesuai tugas dan fungsi sebagai koordinator manajerial, tantangan yang dihadapi Sekretariat BRSDM dalam rangka mendukung Program Pembangunan KP yaitu terjadinya Transformasi Kelembagaan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KP menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP berpengaruh pada tugas Sekretariat untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengaturan SOTK, SDM, penyesuaian rencana strategis, rencana kerja dan NSPK lainnya, pengalokasian anggaran, dan sarana prasarana pada unit kerja level di bawahnya beserta agar fungsi pada BPPSDM dapat berjalan optimal;



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) tahun 2020-2024, mengacu pada Reviu Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) tahun 2023 yang telah ditandatangani Kepala BRSDM pada tanggal 23 Juni 2023.

Reviu atas Revisi target tercantum pada Bab IV Bagian 4.12 dokumen Rencana Strategis BRSDM Nomor 180/PER-BRSDM/2021 tanggal 29 Maret 2021. Perubahan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) didasari kepada dokumen Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja KKP Tahun 2023, tindak lanjut hasil Rapim KKP, capaian IKU tahun 2022 dan usulan pemutakhiran lingkup BRSDMKP.

Berdasarkan nota dinas Biro Perencanaan Nomor: 938/SJ.1/RC.610/XI/2023 tanggal 1 November 2023 perihal hasil pembahasan Indikator Kinerja (IK) Manajerial tahun 2024 dan surat Sekretaris BRSDM Nomor B.2745/BPPSDM.1/RC.610/XI/2023 tentang Permohonan Pengesahan Perjanjian Kinerja Level 1 BRSDM Tahun 2023, terdapat perubahan indikator beserta target di lingkup BRSDM KP yang meliputi sebagai berikut:

1. Penghapusan Sasaran Program, Indikator beserta targetnya pada Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan berkenaan dengan revisi buka blokir dan pergeseran anggaran antar-program;
2. Penambahan volume target IKU Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan yang ditingkatkan kapasitasnya semula 39 unit menjadi 44 unit bersamaan dengan revisi pergeseran anggaran antar-RO PN;
3. Penambahan target IKU "Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya semula 1.800 kelompok menjadi 1.980 kelompok, merujuk pada dukungan pelaksanaan RB tematik KKP sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri KP

Nomor 166 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kep Men KP nomor 32 tahun 2021 tentang Road Map RB KKP 2020-2024;

4. Penghapusan IKU "Penilaian Mandiri RB" dan Perubahan target IKU "Nilai IKPA Lingkup BPPSDMKP" semula 89 menjadi 93,75 berkenaan dengan dukungan kegiatan utama RB general KKP sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri KP Nomor 166 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kep Men KP nomor 32 tahun 2021 tentang Road Map RB KKP 2020-2024

Tabel 1. Perubahan Indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BRSDM Per November 2023


SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2023				
		RENSTRA	PK AWAL	PK JUNI	PK November	
1 SDM KP Peserta Diklat yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri	1	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	70	70	70	70
	2	Nilai PNBP BRSDM (Rupiah Miliar)	-	24,731	24,731	24,731
2 SDM KP Peserta Diklat yang Membentuk Start Up (Usaha Rintisan)	3	Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	225	392	392	392
3 Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dan dikembangkan	4	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (kelompok)	2.000	3.000	3.000	3.400
	5	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (kelompok)	1.500	1.800	1.800	1.980
	6	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRSDM (orang)	-	12.342	12.342	12.342

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET 2023			
				RENSTRA	PK AWAL	PK JUNI	PK November
4	Iptek Hasil Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat	7	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP (Desa Perikanan Cerdas) (desa)	11	7	7	10
5	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan	8	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	-	14	39	44
	Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BRSDM	9	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup BRSDM (unit)	12	15	15	15
		10	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRSDM dibandingkan Realisasi Anggaran BRSDM TA 2022 (%)	≤1,0	≤0,5	≤0,5	≤0,5
		11	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BRSDM (indeks)	75	75	75	75
		12	Nilai PM SAKIP BRSDM (nilai)	86,5	80,5	80,5	80,5
		13	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BRSDM (nilai)	3	3,1	3,1	3,1
		14	Persentase Unit kerja Lingkup BRSDM yang menerapkan	88	92	92	92

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2023			
		RENSTRA	PK AWAL	PK JUNI	PK November
	sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)				
	15 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup BRSDM (%)	75	75	75	80
	16 Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan BRSDM (Nilai)	1 (unit kerja)	75	75	75
	17 Nilai IKPA Lingkup BRSDM (nilai)	90	89	89	93,75
	18 Nilai NKA Lingkup BRSDM (nilai)	88	86	86	86
	19 Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup BRSDM (%)	72,5	77,5	77,5	77,5
	20 Persentase Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BRSDM (%)	72,5	77,5	77,5	77,5
	21 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang)	4.800	5.005	5.195	5.235

B. RENCANA KERJA TAHUNAN (RENJA) 2023

BPPSDM KP memiliki 3 program utama di Tahun 2023 dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis. Program tersebut meliputi Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, dan Program Dukungan Manajemen dengan rincian



Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi terdiri dari 5 sasaran program dan 8 indikator kinerja program, Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan terdiri dari 1 sasaran program dan 1 indikator kinerja program dan Program dukungan manajemen terdiri dari 1 sasaran program dan 14 indikator kinerja program.

Program utama tersebut diturunkan menjadi beberapa kode kegiatan. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi didukung oleh Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dengan kode kegiatan 2375 dan kegiatan Pendidikan Kelautan dan Perikanan dengan kode kegiatan 2376. Kedua program tersebut merupakan salah satu komitmen dari BPPSDM KP dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang berkualitas. Selain itu, BPPSDM KP berkomitmen untuk mendukung terciptanya Ekosistem Kelautan dan Perikanan berkelanjutan melalui Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan yang didukung oleh kegiatan Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan dengan kode kegiatan 6703, kegiatan Inkubasi Bisnis Kelautan dan Perikanan dengan kode kegiatan 6704, kegiatan Pengujian Kelayakan Teknologi Kelautan dan Perikanan dengan kode kegiatan 6705, dan kegiatan Analisis Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dengan kegiatan 6706.

Program Dukungan Manajemen didukung oleh 2 kegiatan yaitu kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan kode kegiatan 2378, dan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP dengan kode kegiatan 4345. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP ditempatkan pada program dukungan manajemen berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang menyebutkan bahwa sepanjang program Pendidikan dan pelatihan diperuntukkan bagi SDM aparatur internal K/L maka mekanisme penganggarnya masuk ke dalam Dukungan Manajemen.

Rincian Rencana Kerja Tahunan (Renja) BPPSDM Tahun 2023, pada Tabel berikut:

Tabel 2. Rencana Kerja Tahunan (Renja) BPPSDM Tahun 2023

PROGRAM	Sasaran Program	Kode Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Satuan
DL-Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	01-SDM KP Peserta Diklat yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri	2375	01-Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih	31490	orang
		2376	01-Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten	8291	orang
	02-SDM KP Peserta Diklat yang Membentuk Start Up (Usaha Rintisan)	2375	02-Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang bersertifikat Kompetensi	1800	orang
		2375	03-Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	Kajian Inovasi yang diterapkan untuk Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Kaji Terap)	13	produk
		2375	07-Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP	Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria Pelatihan dan Penyuluhan KP	9	layanan
		2376	03-Terselenggaranya Kajian Pendidikan Tinggi KP	Kajian Pendidikan Tinggi KP	20	kajian
		2376	05-Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pendidikan KP	Layanan NSPK Pendidikan KP	5	NSPK
	03-Kelompok kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan dikembangkan	2375	04-Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Kelompok pelaku utama/usaha yang ditingkatkan kinerja usahanya	47000	kelompok
	04-Iptek Hasil Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat	2375	05-Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	Pengujian Kelayakan Teknologi untuk Penyuluh Perikanan	3	produk
				Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan	16	kelompok masyarakat
		2376	02-Terselenggaranya Pengabdian Pendidikan Tinggi KP	pengabdian pendidikan tinggi KP	13	paket

PROGRAM	Sasaran Program	Kode Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Satuan
	05-Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan	2375	06-Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	10	unit
		2376	04-Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan KP Yang Terstandar	sarana pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya	2	unit
				Prasarana Pendidikan Tinggi KP yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	unit
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	23-Perumusan kebijakan KP yang digunakan untuk penyusunan kebijakan	6703	01-Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP	11	NSPK
		6703	04-Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan	3	unit
		6704	01-Tersedianya usaha KP yang meningkat kapasitas usahanya	NSPK Inkubasi Bisnis KP	4	NSPK
		6704	02-Tersedianya Sarana Prasarana Inkubasi Bisnis Kelautan dan Perikanan	Sarana Inkubasi Bisnis Kelautan dan Perikanan	2	unit
		6705	03-Tersedianya Sarana Prasarana pengujian kelayakan teknologi Kelautan dan Perikanan	Sarana Prasarana pengujian kelayakan teknologi Kelautan dan Perikanan	1	unit
WA-Program Dukungan Manajemen	14-Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan BRSDMKP	2378	01-Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	Nilai PM PRB BRSDMKP	32	Nilai
				Indeks Profesionalitas ASN	75	Indeks
				Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	12	unit

PROGRAM	Sasaran Program	Kode Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Satuan
				Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran	≤1	%
				Nilai Penilaian Mandiri (PM) SAKIP	81,22	Nilai
				Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	level
				Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	88	%
				Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja	75	%
				Unit yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik	1	unit
				Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	89	Nilai
				Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	86	Nilai
				Persentase Tingkat Kepatuhan pengelolaan BMN lingkup BRSDM	75	%
				Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BRSDM	75	%
				Pendidikan dan pelatihan aparatur	5005	orang

PROGRAM	Sasaran Program	Kode Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Satuan
		2378	02-Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Tersedianya Sarana dan Prasarana Sekretariat BRSDMKP	1	layanan
		2378	03-Terpenuhinya Layanan Perkantoran	Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lingkup BRSDMKP	12	bulan
				Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup BRSDMKP	12	bulan
		4345	01-Jumlah Aparatur yang Dididik dan Dilatih	Aparatur KKP yang Diberikan Beasiswa	190	orang
				Aparatur KKP yang Diberikan Izin Belajar	45	orang
				Aparatur KKP yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan	4770	orang

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan sasaran strategis pada lingkup BRSDM, Sekretariat BRSDM menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 yang terdiri atas 3 Sasaran Kegiatan yaitu :(1). Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BRSDM; (2). Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal Sekretariat BRSDM; dan (3). Terpenuhinya Layanan Perkantoran Sekretariat BRSDM. Rincian anggaran pada setiap Sasaran Kegiatan sebagai berikut:


Tabel 3. Anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2023

NO.	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.000)
1	Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat BRSDM	22.800.000.000
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.400.000.000
3	Layanan Perkantoran	34.700.000.000
Total Anggaran Sekretariat Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2023		59.900.000.000

C. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan indikator kinerja dan target kinerja yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja (PK). Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja yang menjadi tekad serta janji pimpinan unit kerja kepada pimpinan tertinggi Kementerian/Lembaga untuk menerima amanah/tanggung jawab/kinerja yang diberikan serta menjalankan target yang ditetapkan.

Sekretariat BRSDM memiliki 3 sasaran strategis pada Tahun 2023 yaitu: (1). Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BRSDM; (2). Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal Sekretariat BRSDM;



dan (3). Terpenuhinya Layanan Perkantoran Sekretariat BRSDM. Tiga sasaran strategis tersebut dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang mengalami 3 (tiga) kali perubahan pada periode Januari – November 2023. Perubahan tersebut meliputi sebagai berikut:

1. Perubahan pimpinan eselon II Sekretariat BRSDM mengakibatkan perubahan PK di bulan April 2023
2. Penambahan 2 (dua) IKU baru yaitu Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BRSDM yang Ditangani, dengan target 100% dan IKU Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRSDM, dengan target sebesar 90 di Bulan Juni 2023. Penambahan IKU tersebut Keputusan Menteri KP Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan KKP.
3. Pada bulan November 2023, adanya perubahan sebagai berikut:
 - a. Penghapusan Sasaran Program, Indikator beserta targetnya pada Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan berkenaan dengan revisi buka blokir dan pergeseran anggaran antar-program;
 - b. Penambahan volume target IKU Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan yang ditingkatkan kapasitasnya semula 39 unit menjadi 44 unit bersamaan dengan revisi pergeseran anggaran antar-RO PN;
 - c. Penambahan target IKU "Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya semula 1.800 kelompok menjadi 1.980 kelompok, merujuk pada dukungan pelaksanaan RB tematik KKP sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri KP Nomor 166 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kep Men KP nomor 32 tahun 2021 tentang Road Map RB KKP 2020-2024;

- d. Penghapusan IKU "Penilaian Mandiri RB" dan Perubahan target IKU "Nilai IKPA Lingkup BPPSDMKP" semula 89 menjadi 93,75 berkenaan dengan dukungan kegiatan utama RB general KKP sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri KP Nomor 166 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kep Men KP nomor 32 tahun 2021 tentang Road Map RB KKP 2020-2024

Perjanjian Kinerja Sekretariat BRSDM Tahun 2023 per November 2023 pada tabel berikut:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Sekretariat BRSDM Per November 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Manajemen BRSDM	1	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDM (unit)	15
		2	Unit kerja yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK Lingkungan BPPSDM (unit/Satker)	7
		3	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM (%)	≤0,5
		4	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Sekretariat BRSDM (indeks)	81
		5	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM (nilai)	80,5
		6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat BRSDM (Nilai)	93
		7	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM (nilai)	3,1
		8	Persentase Unit kerja Sekretariat BRSDM yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92
		9	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat BRSDM (%)	80
		10	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM (%)	75

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat BRSDM (nilai)	93,75
		12	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat BRSDM (nilai)	82
		13	Tingkat Kepatuhan BMN BPPSDM (%)	77,5
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPSDM (%)	77,5
		15	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPSDM (%)	100
		16	Nilai PNBP BPPSDM (Rupiah Miliar)	24,731
		17	Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup BPPSDM (orang)	12.342
		18	Kerja Sama Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati (Kesepakatan)	45
		19	Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati (%)	72
		20	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Sekretariat BRSDM (%)	100
		21	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDM yang Ditangani (%)	100
		22	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPPSDM (Nilai)	90
2	Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal Sekretariat BRSDM	23	Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Sekretariat BRSDM tepat waktu (%)	100
3	Terpenuhinya Layanan Perkantoran Sekretariat BRSDM	24	Persentase Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Sekretariat BRSDM tepat waktu (%)	100
		25	Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran Sekretariat BRSDM tepat waktu (%)	100

D. PENGUKURAN KINERJA

1. Teknik Penghitungan

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat BRSDM Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU. Metode tersebut akan dikonversi menjadi indeks capaian IKU. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:


1. Capaian maksimum adalah 120%;
2. Capaian minimum adalah 0%;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda; dan
4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Status Indeks Capaian IKU

Warna	Rentang Nilai	Status Indeks
Blue	Nilai 110 - 120	Istimewa
Green	Nilai 90 - <110	Baik
Yellow	Nilai 70 - <90	Cukup
Red	Nilai 50 - <70	Kurang
Dark Grey	Nilai <50	Sangat Kurang
Light Grey		Belum ada penilaian

2. Tata Cara Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja Sekretariat BRSDM dilakukan secara berkala setiap triwulan, yaitu bulan Maret, Juni, September dan Desember. Pengukuran kinerja dilaksanakan oleh tim yang melaksanakan pengukuran dan pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja dilaksanakan secara berjenjang dari masing-masing penanggung jawab IKU hingga level Pimpinan. Tahapan terakhir dalam proses pengukuran kinerja adalah verifikasi dan validasi capaian kinerja. Hal ini untuk memastikan bahwa capaian yang dilaporkan di aplikasi Kinerjaku sesuai



dengan data dukung yang dilampirkan oleh masing-masing satuan kerja.



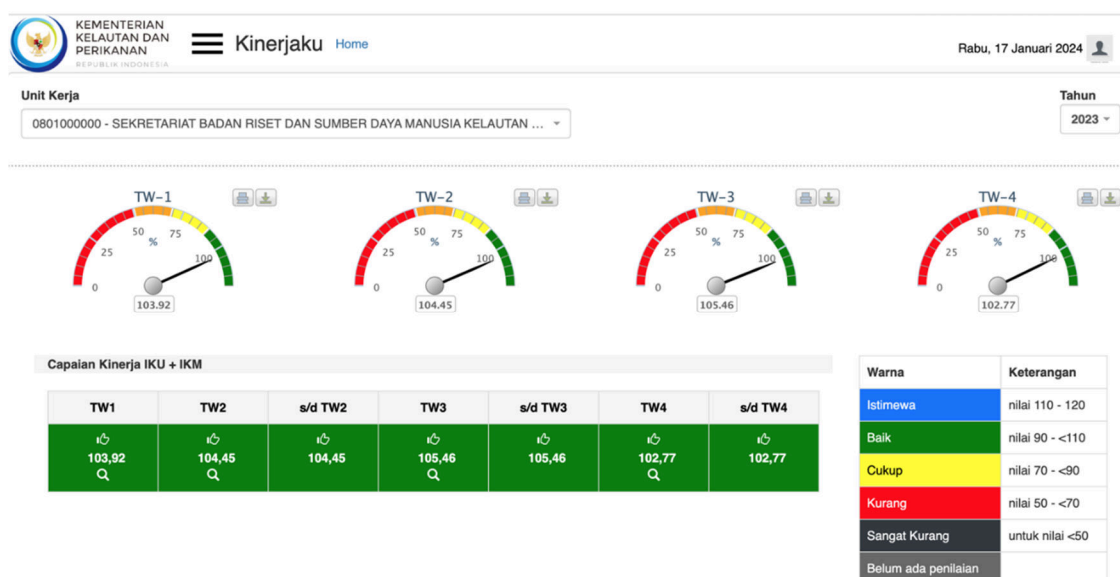


Bab III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat BRSDM tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI). Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak yang terintegrasi di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh data capaian kinerja Sekretariat BRSDM Tahun 2023 sebesar 102,77%, sebagaimana *dashboard* kinerja sebagai berikut:



Gambar 2. Capaian Kinerja Sekretariat BRSDM Tahun 2023

Sekretariat BRSDM pada Tahun 2023 mengampu program dukungan manajemen yang didukung oleh kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPSDM yang terdiri atas 25 (dua puluh lima) IKU. Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, sebanyak 17 IKU berkinerja Baik (nilai 90 - < 110), dan 8 IKU berkinerja Istimewa (nilai 110 – 120). Faktor tersebut yang menjadi pengungkit sehingga capaian NKO Sekretariat BRSDM di kategorikan baik berdasarkan indeks pada Aplikasi Kinerjaku (gambar 2).

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi dan analisis kinerja menampilkan perbandingan target (rencana) dengan realisasi tahun berjalan, kinerja dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah berikut analisis keberhasilan/penurunan kinerja pada indikator kinerja utama di masing-masing Sasaran Kegiatan.

Sekretariat BRSDM sesuai revisi PK per November 2023, menjalankan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dengan 25 IKU, dengan capaian secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 6. Capaian Kinerja Sekretariat BRSDM Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2023		
		Target	Capaian	%
1 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BRSDM	1 Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDM (unit)	15	16	106,67
	2 Unit kerja yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK Lingkungan BPPSDM (unit/Satker)	7	7	100
	3 Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM (%)	≤0,5	0	120
	4 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Sekretariat BRSDM (indeks)	81	87,93	108,56
	5 Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM (nilai)	80,5	84,33	104,76
	6 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat BRSDM (Nilai)	93	95,94	103,16
	7 Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM (nilai)	3,1	3,8	120
	8 Persentase Unit kerja Sekretariat BRSDM yang	92	116,58	120

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2023				
		Target	Capaian	%		
	menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)					
	9 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat BRSDM (%)	80	80,95	101,19		
	10 Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM (%)	75	81,52	108,69		
	11 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat BRSDM (nilai)	93,75	92,37	98,53		
	12 Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat BRSDM (nilai)	82	83,72	102,10		
	13 Tingkat Kepatuhan BMN BPPSDM (%)	77,5	90,00	116,13		
	14 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPSDM (%)	77,5	88,00	113,55		
	15 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPSDM (%)	100	100	100		
	16 Nilai PNBP BPPSDM (Rupiah Miliar)	24,731	32,06	120		
	17 Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup BPPSDM (orang)	12.342	12.519	101,43		
	18 Kerja Sama Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati (Kesepakatan)	45	50	111,11		
	19 Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati (%)	72	75,85	105,35		
	20 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Sekretariat BRSDM (%)	100	100	100		
	21 Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDM yang Ditangani (%)	100	100	100		
	22 Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPPSDM (Nilai)	90	100	111,11		
2	Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal Sekretariat BRSDM	23	Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Sekretariat BRSDM tepat waktu (%)	100	100	100

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2023			
		Target	Capaian	%	
3 Terpenuhiya Layanan Perkantoran Sekretariat BRSDM	24	Persentase Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Sekretariat BRSDM tepat waktu (%)	100	100	100
	25	Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran Sekretariat BRSDM tepat waktu (%)	100	100	100

SASARAN KEGIATAN -1

TERPENUHINYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN BPPSDM

Sasaran kegiatan "Terpenuhiya Layanan Dukungan Manajemen BRSDM" didukung oleh 22 (dua puluh dua) indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan dan diukur keberhasilannya sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA 1

Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDM (unit)

Definisi dari IKU ini adalah jumlah unit kerja lingkup BPPSDM yang berpredikat menuju WBK. Hal ini sebagai implementasi dari Komitmen Bersama seluruh Pejabat Eselon I untuk mewujudkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) pada tanggal 10 Desember 2018 sehingga setiap unit kerja Eselon I lingkup KKP sebagai unit pembangun integritas berperan untuk mendorong terwujudnya WBK dan WBBM pada masing-masing unit kerjanya.

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, BPPSDM menetapkan satuan kerja untuk menjadi proyek percontohan. Penetapan Satker sebagai WBK tersebut dimaksudkan sebagai kompetisi dalam penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Satker di lingkungan BPPSDM dengan menerapkan instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

IKU Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDM (unit) tahun 2023 diukur Triwulanan dengan polarisasi *Maximize*. Capaian kinerja pada IKU tersebut sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDM (unit)

IKU-1. Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDM (unit)								
Realisasi Tahun			Tahun 2023			% Kenaikan Tahun 2022-2023	Renstra BPPSDM (2020 - 2024)	
2020-2022			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thd target 2024
2020	2021	2022						
-	10	13	15	16	106,67	23,08	15	106,67

Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 16 unit atau 106,67% dari target 15 unit. Capaian tersebut mengalami kenaikan sebesar 23,08% dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024, maka capaian Tahun 2023 ini dianggap sudah tercapai dari target sebanyak 15 unit di Tahun 2024 dengan persentase capaian sebesar 106,67%. Hal ini merupakan salah satu komitmen BPPSDM dalam menciptakan satuan kerja yang transparan, bebas dari praktek korupsi dan handal dalam pengelolaan keuangan.

Capaian ini merupakan akumulasi capaian mulai Tahun 2017 hingga Tahun 2023 dengan rincian satuan kerja BPPSDM yang telah berpredikat WBK, sebagai berikut:


Tabel 8. Satuan Kerja Lingkup BPPSDM Berpredikat WBK Tahun 2017 – 2023

No	Satuan Kerja	Tahun Perolehan
1	Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak	2017

No	Satuan Kerja	Tahun Perolehan
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3) Maros	2017
3	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP) Gondol	2017
4	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal	2017
5	Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waeheru	2018
6	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi	2018
7	Balai Riset Observasi Laut, Perancak	2019
8	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BPRPUPP) Palembang	2019
9	Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) Sukamandi	2021
10	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan	2021
11	Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	2022
12	Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta	2022
13	Balai Diklat Aparatur Sukamandi	2022
14	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon	2023
15	Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran	2023
16	Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo	2023

Faktor yang mendukung keberhasilan dalam Upaya pencapaian target IKU Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDM (unit) antara lain:

1. Kemampuan BPPSDM dalam mengidentifikasi permasalahan yang menjadi komponen pengungkit pada aspek manajemen perubahan, penataan tata laksana, Sumber Daya Manusia (SDM), akuntabilitas, pengawasan, serta peningkatan layanan dan komponen hasil yang terdiri dari integritas dan persepsi terkait layanan;

- 
2. Penyusunan Peta Pembangunan Zona Integritas untuk mempermudah pemahaman visi, misi, motto, tujuan, dan indikator keberhasilan pelaksanaan ZI WBK/WBBM di tiap unit kerja;
 3. Melaksanakan strategi komunikasi sebagai media interaksi kepada masyarakat;
 4. Keterlibatan seluruh pegawai dalam membangun integritas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam upaya menunjang keberhasilan pencapaian target indikator kinerja ini adalah pelaksanaan kegiatan pendampingan kepada UPT dengan melibatkan Pusat dan Inspektorat Jenderal KKP. Hal ini merupakan strategi percepatan tumbuhnya UPT yang berpredikat WBK serta mempertahankan predikat WBK bagi UPT yang sudah dinyatakan lulus pada periode sebelumnya. Dukungan tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2017, yang mengintruksikan kepada unit kerja yang telah berpredikat WBK lebih dari 2 (dua) tahun harus dilakukan penilaian ulang untuk mempertahankan predikat WBK.

INDIKATOR KINERJA 2

Unit kerja yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK lingkungan BPPSDM (unit/Satker)

Definisi dari IKU ini adalah jumlah unit kerja lingkup BPPSDM yang dipersiapkan dan dibangun zona integritas untuk dijadikan rintisan unit kerja yang berpredikat WBK. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Eselon I untuk akselerasi terhadap unit kerja yang akan dibangun zona integritas dan akan diusulkan untuk dilakukan penilaian agar menjadi unit kerja yang berpredikat WBK.

BPPSDM melalui Nota Dinas Nomor 84/BRSDM.1/KP.750/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 perihal Pengajuan Unit Kerja yang akan dibangun Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan BPPSDM Tahun 2023 sebanyak 7 unit kerja yaitu: (1). Politeknik KP Pangandaran; (2). Politeknik KP Bitung; (3). Politeknik KP Sidoarjo; (4). Politeknik KP Karawang; (5). Politeknik KP Jember; (6). Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung; dan (7). Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

Penetapan unit kerja yang dibangun menuju WBK tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Yang Dibangun Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KP Tahun 2023. Unit kerja tersebut diberikan assistensi dan dinilai secara mandiri dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Insnsi Pemerintah. Hasil dari assistensi ini memberikan usulan secara jelas bagi unit kerja untuk memperbaiki tata kelola pelaksanaan organisasi sehingga dapat memenuhi syarat menjadi WBK.

IKU Unit kerja yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK lingkungan BPPSDM (unit/Satker) diukur Tahunan dengan Polarisasi *Maximize*. Capaian kinerja IKU pada tersebut sebagai berikut:

Tabel 9. Unit kerja yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK lingkungan BPPSDM (unit/Satker)

IKU-2. Unit kerja yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK lingkungan BPPSDM (unit/Satker)								
Realisasi Tahun			Tahun 2023			% Kenaikan Tahun 2022-2023	Renstra BPPSDM (2020 -2024)	
2020-2022			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thd target 2024
2020	2021	2022						
2	8	6	7	7	100	16,67	16	43,75

Berdasarkan tabel 9 diketahui bahwa capaian indikator kinerja sebanyak 7 unit kerja atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Terjadi peningkatan sebesar 16,67% dari Tahun 2022 serta persentase kontribusi capaian Tahun 2023 terhadap Tahun 2024 sebesar 43,75% dari target sebanyak 16 unit kerja. Kenaikan tersebut tidak terlepas dari proses assistensi tersebut. Pendampingan yang masif serta keseriusan UPT untuk membangun ZI WBK memberikan dampak positif bagi organisasi. Adapun hasil penilaian tersebut sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Assistensi Pembangunan Zona Integrasi Wilayah Bebas Korupsi

UPT	Indikator Pengungkit		Indikator Hasil	
	Nilai	Status	Nilai	Status
Politeknik KP Jembrana	26,32	Tidak memenuhi syarat WBK	2,5	Tidak memenuhi syarat WBK
Politeknik KP Karawang	3,51	Tidak memenuhi syarat WBK	3,75	Tidak memenuhi syarat WBK
BPPP Ambon	48,72	Memenuhi syarat WBK	36,43	Memenuhi syarat WBK
BPPP Bitung	52,85	Memenuhi syarat WBK	32,51	Memenuhi syarat WBK
Politeknik KP Bitung	48,12	Memenuhi syarat WBK	36,81	Memenuhi syarat WBK
Politeknik KP Pangandaran	43,27	Memenuhi syarat WBK	38,82	Memenuhi syarat WBK
Politeknik KP Sidoarjo	48,16	Memenuhi syarat WBK	37	Memenuhi syarat WBK

Hasil asistensi Inspektorat Jenderal I memperlihatkan bahwa terdapat 5 dari 7 UPT yang direkomendasikan dianggap memenuhi syarat untuk menjadi WBK. Tiga (3) UPT diantaranya yaitu BPPP Ambon, Politeknik Pangandaran dan Politeknik KP Sidoarjo berhasil merealisasikan dan mendapatkan sertifikat ZI WBK. Strategi ini dirasa lebih efektif dan efisien untuk mempercepat UPT lingkup BPPSDM untuk segera mendapatkan status ZI-WBK.

INDIKATOR KINERJA 3

Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK BPPSDM merupakan audit oleh auditor atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan Surat Sekretaris BRSDM nomor B.6509/BRSDM.1/HP.520/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023, dari total pagu Sekretariat BRSDM tahun 2022 sebesar Rp. 76.750.714.000,- dan realisasi sebesar Rp. 74.374.496.869,- tidak terdapat temuan nilai kepatuhan. Kondisi ini mengakibatkan capaian IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK Lingkup Sekretariat BRSDM sebesar 0 % atau persentase capaian realisasi sebesar 120%. Capaian tersebut merupakan bentuk konsistensi sejak Tahun 2020 dimana Sekretariat BRSDM selalu nihil temuan LHP BPK.

IKU Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM (%) diukur Tahunan dengan Polarisasi *Minimize*. Capaian Kinerja pada IKU tersebut sebagai berikut:

Tabel 11. Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas BPPSDM (%)

IKU-3. Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM (%)								
Realisasi Tahun			Tahun 2023			% Kenaikan Tahun 2022-2023	Renstra BPPSDM (2020 -2024)	
2020-2022			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thd target 2024
2020	2021	2022						
0	0	0	≤0,5	0	120	-	≤1	-

Konsistensi tersebut merupakan bentuk komitmen pimpinan dalam melakukan pengendalian internal atas pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Sekretariat BRSDM. Selain itu, adanya pendampingan dan pemantauan dari para pihak terkait (Sekretariat, Biro Keuangan, Itjen dan Kementerian Keuangan) sehingga terciptanya tata kelola keuangan yang baik. Kehandalan dan kemampuan dalam melakukan pengendalian internal dan tertib

administrasi keuangan ini perlu dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya sehingga temuan hasil pemeriksaan BPK diharapkan selalu $\leq 1\%$ bahkan 0% dari realisasi pagu anggaran.

INDIKATOR KINERJA 4

Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Sekretariat BRSDM (indeks)


Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Terdapat empat dimensi indeks profesionalitas yang terdiri dari kompetensi, kualifikasi, disiplin dan kinerja dengan bobot penilaian secara berurutan: kompetensi (40), kinerja (30), kualifikasi pendidikan (25) dan disiplin (5).

IKU indeks profesionalitas ASN lingkup Sekretariat BRSDM, dilakukan pengukuran semesteran dengan Polarisasi *Maximize*. Capaian IKU ini merujuk pada surat Sekretaris BRSDM Nomor: 222/BRSDM.1/KP.720/VII/2023 tentang Capaian IP ASN Semester II Tahun 2023 tanggal 10 Januari 2023, Adapun capaian tersebut sebagai berikut:

Tabel 12. Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat BRSDM (indeks)

IKU-4. Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat BRSDM (indeks)								
Realisasi Tahun			Tahun 2023			% Kenaikan Tahun 2022-2023	Renstra BPPSDM (2020 -2024)	
2020-2022			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thd target 2024
2020	2021	2022						
77,88	80,79	82,07	81	87,93	108,56	7,14	76	115,70

Berdasarkan Tabel 12 diketahui bahwa capaian indikator ini sebesar 87,93 atau 108,56% dari target 81. Capaian tersebut mengalami kenaikan



sebesar 7,14% dibandingkan dengan tahun 2022, sehingga pencapaian tersebut mengindikasikan bahwa kualitas ASN Sekretariat BRSDM selalu naik sejak Tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target Tahun 2024, capaian kinerja Tahun 2023 berada di atas target yang ditetapkan atau 115,70 % dari target 2024.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian IKU Indeks Profesionalitas ASN lingkup Sekretariat BRSDM, antara lain adanya kegiatan pengembangan kompetensi berupa sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 yang diikuti pegawai BPPSDM. Kegiatan sosialisasi ini mengaktifkan minat pegawai sekretariat BRSDM untuk mengikuti kegiatan-kegiatan webinar atau pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan secara daring. Faktor lainnya yang mendukung ketercapaian IKU adalah adanya dokumen perencanaan pengembangan SDM Aparatur yang telah disusun secara berkala dengan di dukung pelayanan kelembagaan yang baik sehingga terciptanya ASN Sekretariat BPPSDM berkualitas.

INDIKATOR KINERJA 5

Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM (nilai)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan Instansi pemerintah untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai. Akuntabilitas Kinerja sebagai suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (*input*) atau kegiatan (*output*) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau *outcome*. Dalam rangka evaluasi tingkat akuntabilitas, Inspektorat Jenderal KKP melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada masing-masing unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, sementara Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada tingkat kementerian Pusat/Daerah.

Capaian IKU Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM (nilai) Tahun 2023, sebagaimana Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 pada BPPSDMKP sesuai surat Inspektur I, Inspektorat Jenderal KKP nomor T.133/ITJ.1/HP.440/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, memperoleh nilai 84,33 dari nilai maksimum 100 atau mendapat predikat A (interpretasi memuaskan). Secara keseluruhan hasil penilaian mandiri SAKIP seluruh satker di lingkungan BPPSDM telah mencapai target bahkan melampaui target IKU. Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Level 2 lingkup BPPSDM telah disampaikan kepada level 2 lingkup BPPSDM melalui surat Sekretaris BPPSDM nomor B.3352/BPPSDM.1/RC.510/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023, dan Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Level 3 lingkup BPPSDM telah disampaikan kepada seluruh UPT di lingkungan BPPSDM melalui surat Sekretaris BPPSDM nomor B.3768/BPPSDM.1/RC.510/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023.

Tabel 13. Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM (nilai)

IKU-5. Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM (nilai)								
Realisasi Tahun			Tahun 2023			% Kenaikan Tahun 2022-2023	Renstra BPPSDM (2020 - 2024)	
2020-2022			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thd target 2024
2020	2021	2022						
87,93	86,65	81,22	80,5	84,33	104,76	3,83	86,75	97,21

Periode pengukuran IKU ini adalah Tahunan dengan polarisasi maximize. Capaian kinerja IKU ini sebesar 84,33 atau 104,76 % dari target 80,50. Kenaikan terjadi pada Tahun 2023 sebesar 3,83% dari Tahun 2022. Capaian ini dibandingkan target pada tahun 2024 sebesar 86,75 telah tercapai sebesar 97,21%. Faktor ketercapaian SAKIP BPPSDM dikarenakan adanya sinergitas antar ketua tim kerja sehingga seluruh komponen pendukung SAKIP bisa dipenuhi dengan baik dan menghasilkan tata kelola keuangan yang handal.

Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini adalah pelaksanaan penilaian mandiri SAKIP yang dilakukan secara berjenjang mulai dari level 1 ke level 2, dan level 2 ke level 3 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPPSDM dengan pendampingan SAKIP dan LKJ oleh Inspektorat Jenderal.

Sosialisasi dan pendampingan SAKIP ke seluruh satker BPPSDM dan tim SAKIP dan penyusunan LKJ. Beberapa faktor yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka peningkatan nilai SAKIP antara lain perlu adanya pengawasan terhadap kelengkapan data dukung hasil pengukuran kinerja pegawai (SKP) di lingkungan BPPSDM, dan peningkatan ketertiban unit kerja dalam mendokumentasikan proses implementasi SAKIP di unit kerja masing-masing.

INDIKATOR KINERJA 6


Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat BRSDM (Nilai)

Nilai rekonsiliasi kinerja Sekretariat merupakan *quick assessment* terhadap SAKIP instansi. Dokumen yang digunakan dalam penilaian mencakup kepatuhan, kesesuaian, ketercapaian dan ketepatan dokumen. IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja di *cascading* ke seluruh satker di lingkungan BPPSDM. Dalam rangka mengawal pencapaian target IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja tahun 2023, telah dilakukan pendampingan *assessment* awal capaian IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja di 8 satuan Pendidikan Tinggi, 6 Satuan Pendidikan Menengah, dan 5 BPPP di lingkup BPPSDM.

Pengukuran IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat BRSDM (Nilai) adalah tahunan dengan polarisasi *Maximize*. Capaian IKU pada Tahun 2023 berdasarkan surat Sekretaris BRSDM nomor: B.7354/BPPSDM.1/RC.510/XI/2023 tanggal 24 November 2023, tentang Penyampaian Hasil Rekonsiliasi Kinerja Level II di Lingkungan BPPSDM Tahun 2023 dengan nilai sebesar 95,94 dari target 94 atau 102,06%. Capaian IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat BRSDM (Nilai), sebagai berikut:

Tabel 14. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat BRSDM (Nilai)

IKU-6. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat BRSDM (Nilai)								
Realisasi Tahun			Tahun 2023			% Kenaikan Tahun 2022-2023	Renstra BPPSDM (2020 - 2024)	
2020-2022			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thd target 2024
2020	2021	2022						
-	95,20	95,83	93	95,94	102,06	0,11	94	102,06



Realisasi capaian kinerja mengalami kenaikan sebesar 0,11% dari Tahun 2022 dengan persentase capaian terhadap target 2024 sebesar 102,06%. Capaian tersebut secara bertahap mengalami kenaikan dari tahun 2021 yang mengindikasikan bahwa pengelolaan kinerja Sekretariat BRSDM sudah baik. Namun demikian, capaian tersebut masih perlu mendapatkan perhatian agar di Tahun 2024, capaian kinerja rekonsiliasi kinerja dapat meningkat secara signifikan.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam upaya mendukung pencapaian IKU Nilai rekonsiliasi kinerja Sekretariat BRSDM adalah melakukan penyelarasan dokumen perencanaan kinerja, dan pelaporan kinerja dengan kinerjajaku, dalam upaya memenuhi aspek kepatuhan, kesesuaian, dan ketepatan. Keberhasilan atas pencapaian indikator ini tidak terlepas dari komitmen seluruh penanggung jawab IKU dalam mengawal proses pencapaian IKU berikut ketersediaan bukti dukung. Dukungan dan perhatian pimpinan menjadi kunci keberhasilan pencapaian disamping rapat-rapat koordinasi yang dilakukan secara rutin dalam rangka memantau dan memverifikasi hasil capaian dan kendala serta permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian IKU.

INDIKATOR KINERJA 7

Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM (nilai)

Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian *intern* pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Terdapat 5 (lima) unsur yang perlu diturunkan parameternya antara lain: lingkungan pengendalian (*control environment*), penilaian resiko (*risk assessment*), kegiatan pengendalian (*control activities*), informasi dan komunikasi (*information dan communication*), dan kegiatan pemantauan (*monitoring activities*).


Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor B.605/SJ/VIII/2022 tanggal 1 Agustus tentang Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021/2022 mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, maka penilaian mandiri yang sebelumnya dilakukan untuk menilai level maturitas penyelenggaraan SPIP pada tiap unit kerja Eselon I Lingkup KKP diubah dengan hasil pada tingkat Eselon I menggunakan hasil yang diperoleh pada level kementerian.

IKU Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM (nilai) dilakukan pengukuran Tahunan dengan polarisasi *maximize*. Capaian IKU ini pada Tahun 2023 sebesar 3,8 dari target 3,1 atau 120% berdasarkan surat Biro Keuangan Nomor 1479/SJ.2/TU.210/IX/2023 tanggal 4 September 2023. Adapun capaian kinerja IKU tersebut sebagai berikut:

Tabel 15. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM (nilai)

IKU-7. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM (nilai)								
Realisasi Tahun			Tahun 2023			% Kenaikan Tahun 2022-2023	Renstra BPPSDM (2020 -2024)	
2020-2022			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thd target 2024
2020	2021	2022						
3,95	3,00	3,00	3,1	3,8	120	26,67	3	120

Realisasi capaian kinerja Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 26,67% dari Tahun 2022 dan memiliki nilai persentase capaian sebesar 120% jika dibandingkan dengan target Tahun 2024. Keberhasilan SPIP di BPPSDM dipengaruhi oleh komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam pengendalian *intern* yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan kegiatan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka



pencapaian target SPIP antara lain: kegiatan penilaian mandiri oleh Inspektorat Jenderal KKP, pengarahan pimpinan secara berkala dalam rangka pengendalian internal, penilaian kualitas dan strategi pencapaian Sasaran Strategis, penilaian struktur dan proses, penilaian pencapaian tujuan, serta penilaian penjaminan kualitas.

INDIKATOR KINERJA 8

Persentase Unit kerja Sekretariat BRSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

Manajemen pengetahuan merupakan proses untuk menciptakan, menyimpan, mentransfer dan menerapkan pengetahuan dalam organisasi. Manajemen pengetahuan erat kaitannya dengan kolaborasi sehingga pengetahuan yang dihasilkan akan bermanfaat ketika disampaikan kepada pihak- pihak terkait, baik di dalam maupun di luar organisasi.

IKU manajemen pengetahuan yang terstandar KKP mengalami perubahan di Triwulanan III khususnya pada aplikasi pendukung manajemen pengetahuan. Aplikasi yang digunakan untuk mengukur IKU ini semula adalah *Bitrix24.com* dan berubah *Collaboration Office* dengan link <https://portal.kkp.go.id>. Hal ini mengacu pada Nota Dinas Plt. Kepala Pusdatin Nomor 2659/SJ.7/TU.210/IX/2023 tentang Implementasi Portal *Collaboration Office* Triwulan III Tahun 2023 dan Penyampaian perubahan Manual IKU Manajemen Pengetahuan Lingkup KKP pada tanggal 4 September 2023.

Capaian IKU Persentase Unit kerja Sekretariat BRSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) Tahun 2023 sebesar 116,58% atau 120% berdasarkan surat Sekretariat BPPSDM Nomor B. 90/BPPSDM.1/TU.210/I/2024. Pengukuran capaian ini adalah Triwulanan dengan polarisasi *Maximize*. Realisasi Tahun 2023 mengalami kenaikan 16,58% dibandingkan Tahun 2022. Selain itu, capaian pada IKU ini cenderung naik sejak Tahun 2020. Jika tren positif tersebut dapat dipertahankan maka persentase capaian kinerja Tahun 2024 akan mendapatkan hasil maksimal (nilai >110).

Tabel 16. Persentase Unit kerja Sekretariat BRSDM yang menerapkan sistem

manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

IKU-8. Persentase Unit kerja Sekretariat BRSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)								
Realisasi Tahun			Tahun 2023			% Kenaikan Tahun 2022-2023	Renstra BPPSDM (2020 - 2024)	
2020-2022			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thd target 2024
2020	2021	2022						
90	99,35	100	92	116,58	120	16,58	89	120

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini antara lain faktor komitmen Pimpinan baik pejabat eselon I maupun eselon II di lingkungan BPPSDM yang berkontribusi secara aktif pada aplikasi *collaboration office*, berupa informasi dengan ketentuan 5W + 1H, infografis dan Video. Selain itu, terdapat kegiatan pendukung yang menjadi katalis ketercapaian realisasi Tahun 2023 seperti kegiatan sosialisasi aplikasi *collaboration office* dan pemuktkhiran manual IKU sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar kepada seluruh satker di lingkungan BPPSDM sehingga pemahaman terkait perubahan pola hitung pasca beralih dari *bitrix24.com* dapat terinformasikan dengan baik bagi seluruh satuan kerja.

INDIKATOR KINERJA 9

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat BRSDM (%)

Indikator kinerja Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat BRSDM (%) merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit pada periode 1 Oktober 2022 s.d 30 September 2023 atau Triwulan IV Tahun 2022 s.d Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi obyek pengawasan.

Pengukuran IKU Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat BRSDM (%) dilakukan secara Triwulanan dengan polarisasi *Maximize*. Realisasi capaian IKU ini pada tahun 2023 adalah sebesar 80,95 atau 101,19% berdasarkan Surat Sekretaris BRSDM Nomor: B.292/BPPSDM.1/RC.610/I/2024 tanggal 14 Januari 2024. Realisasi tersebut naik 32,47% dibandingkan Tahun 2022 dan cenderung membaik sejak Tahun 2021, meskipun pada Tahun 2020 terjadi penurunan realisasi sebesar 36,81 persen. Capaian tersebut perlu dipertahan agar di Tahun 2024, persentase capaian terhadap targetnya bisa dipertahankan minimal pada kategori baik.


Tabel 17. Capaian Kinerja Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat BRSDM (%)

IKU-9. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat BRSDM (%)								
Realisasi Tahun			Tahun 2023			% Kenaikan Tahun 2022-2023	Renstra BPPSDM (2020 - 2024)	
2020-2022			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thd target 2024
2020	2021	2022						
91,30	57,69	61,11	80	80,95	101,19	32,47	80	101,95

Keberhasilan pencapaian IKU Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat BRSDM (%), dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Komitmen pimpinan dan seluruh entitas lingkup Sekretariat BRSDM untuk menyelesaikan rekomendasi temuan dengan melengkapi seluruh dokumen tindaklanjut dan menyampaikan ke Inspektorat Jenderal.
2. Pengawasan bersama melalui rapat/kordinasi dengan melibatkan Tim Itjen.
3. Pemantauan rutin oleh PIC tindaklanjut rekomendasi LHE Itjen pada Sub Koordinator Keuangan Sekretariat Badan, kepada PIC pada satker *auditeed*.

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian IKU Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat BRSDM (%), antara lain : Koordinasi dengan satuan kerja yang masuk daftar temuan pada lingkup BPPSDM dalam rangka percepatan tindak lanjut temuan



tersebut; Melakukan kompilasi berkas/dokumen tindaklanjut sesuai rekomendasi Tim Auditor Inspektorat Jenderal; Melakukan penginputan/mengupload dokumen tindaklanjut ke dalam aplikasi SIDAK; Melakukan koordinasi sekaligus penyampaian dokumen Tindak lanjut yang sudah di upload dalam aplikasi SIDAK dan melakukan koordinasi dengan tim Auditor terkait BATL hasil penyampaian dokumen Tindak Lanjut.

INDIKATOR KINERJA 10

Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM (%)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kriteria Inovasi adalah memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan. Inovasi yang dimaksud adalah inovasi yang memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan dan memenuhi semangat tema KIPP yang ditentukan oleh Kemen PANRB.

Penentuan nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik BPPSDM ditetapkan melalui rapat pleno yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM sesuai dengan Keputusan Kepala BPPSDM Nomor 6A Tahun 2023 tentang Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM Tahun 2023. Hasil penilaian tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, nomor: B. 2008 /BPPSDM.1/TU.220/IV/2023 tanggal 14 April 2023.

Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM terdiri dari 5 proposal yaitu: (1). SILAJUR (Sistem Pelayanan Jurnal Ilmiah) BBRESKP; (2). SIPINTAR (Sistem Pelatihan Terintegrasi Berbasis Smartphone) BPPP Ambon; (3). PIONS (Polytechnic Integrated Online System) Poltek KP Bitung; (4). OK SOBAT (Olah Sampah Organik Buat Magot) BRBIH; dan (5). MAKLIK (Magang Langsung Klik) LRMPHP. Proposal hasil penilaian tersebut telah disampaikan ke Pusdatin

melalui Nota Dinas Sekretaris BRSDM nomor: 836/BRSDM.1/TU.210/IV/2023 tanggal 14 April 2023 tentang Penyampaian Proposal Inovasi BRSDM Tahun 2023. Pengukuran dilakukan secara tahunan dengan polarisasi *maximize*.


Tabel 18. Capaian Kinerja Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM (%)

IKU-10. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM (%)								
Realisasi Tahun			Tahun 2023			% Kenaikan Tahun 2022-2023	Renstra BPPSDM (2020 - 2024)	
2020-2022			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thd target 2024
2020	2021	2022						
-	-	-	75	75	100	-	-	-

Berdasarkan nota dinas 1181/SJ.7/TU310/IV/2023 tanggal 18 April 2023 tentang penyampaian berita acara hasil sidang pleno penilaian proposal inovasi pelayanan publik diperoleh nilai 75 atau 100% dari target yang ditetapkan. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2022 dan Tahun 2024, karena merupakan IKU baru di Tahun 2023.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja unit kerja yang menerapkan inovasi pelayanan publik lingkup BPPSDM antara lain: Peraturan Menteri KP No. 33 Tahun 2017 tentang penetapan 3 Jenis pelayanan publik pada BPPDM, yaitu: Pelatihan Atkapin dan Ankapin, Pelatihan BST (*Basic Safety Training*) dan Jasa Pengujian Laboratorium. Peraturan tersebut menjadi dasar bagi pengelolaan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan di lingkungan BPPSDM. Selain itu, BPPSDM secara rutin mengadakan kegiatan Bimtek (Bimbingan Teknis) Pelayanan Publik, bagi para petugas pemberi layanan setiap satker di lingkungan BPPSDM. Hal tersebut mampu meningkatkan daya inovasi setiap pegawai untuk menghasilkan suatu terobosan dalam penciptaan *good governance* di lingkup BPPSDM

Upaya-upaya lainnya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan inovasi pelayanan publik antara lain: kegiatan sosialisasi, identifikasi, evaluasi dan upaya peningkatan mutu pelayanan yang terstandar kepada unit kerja yang memiliki pelayanan publik; Koordinasi dan kegiatan pembinaan berkolaborasi dengan Pusdatin sebagai koordinator Pelayanan Publik di tingkat KKP dan tim



Itjen sebagai mitra kerja; Membuat Forum Konsultasi Publik melibatkan Pusdatin, Tim Itjen dan stakeholder terkait, sebagai upaya untuk meningkatkan mutu layanan dengan menciptakan inovasi-inovasi baru yang lebih efektif, efisiensi, mudah, dan ekonomis.

INDIKATOR KINERJA 11

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat BRSDM (nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu Penyerapan Anggaran (bobot 20%), Pengelolaan Uang Persediaan (10%) Penyelesaian Tagihan (20%) Deviasi Halaman III DIPA (11), Penyampaian Data Kontrak, Penyampaian LPJ Bendahara, Revisi DIPA, Pengembalian/Kesalahan SPM, Dispensasi SPM, Renkas/RPD Harian, Retur SP2D (masing masing 5%). Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Periode pengukuran IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat BRSDM (nilai) adalah semesteran dengan polarisasi *maximize*. Realisasi capaian IKU pada Tahun 2023 ini berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan NOMOR 100/SJ.2/TU.210/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Capaian Nilai Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II tahun 2023, diketahui bahwa nilai IKPA Sekretariat BRSDM sebesar 92,37 atau 98,53% dari target yang ditetapkan sebesar 93,75.

Tabel 19. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat BRSDM (nilai)

IKU-11. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat BRSDM (nilai)								
Realisasi Tahun			Tahun 2023			% Kenaikan Tahun 2022-2023	Renstra BPPSDM (2020 - 2024)	
2020-2022			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thd target 2024
2020	2021	2022						
92,41	89,90	87,94	93,75	92,37	98,53	5,04	90	102,63

Realisasi di Tahun 2023 tidak memenuhi target karena terjadi perubahan target pada PK November 2023 dari semula 89 menjadi 93,75. Selain itu, rendahnya penilaian pada aspek deviasi halaman III DIPA perlu menjadi sorotan. Hambatan tersebut dikarenakan kebutuhan dan dinamisasi organisasi yang cukup tinggi sehingga memerlukan dukungan anggaran yang berimplikasi atas deviasi halaman III DIPA serta penyelesaian tagihan kegiatan. Sinergitas antara perencanaan dengan realisasi pada halaman III DIPA harus dikawal dan diawasi sejak anggaran Tahun berjalan ditetapkan. Hal ini untuk mengurangi terjadinya deviasi baik plus ataupun minus sehingga nilai deviasi IKPA dapat dipertahankan dan ditingkatkan nilainya pada Tahun 2024. Namun demikian, capaian tersebut masih naik sebesar 5,04% dibandingkan Tahun 2022 dan cenderung lebih baik dari sejak Tahun 2021. Jika nilai IKPA dapat ditingkatkan maka di Tahun 2024, capaian kinerja IKPA akan mendapatkan nilai istimewa (>110 %) yang berdampak pada peningkatan nilai NKO sekretariat BRSDM.

INDIKATOR KINERJA 12

Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat BRSDM (nilai)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran kementerian/lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Terdapat 3 aspek dalam evaluasi anggaran yang mencakup aspek implementasi, aspek

manfaat dan aspek konteks. Sistem penilaian dapat dilihat melalui aplikasi SMART DJA.

Pengukuran IKU Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat BRSDM dilakukan Tahunan dengan polarisasi *maximize*. Realisasi capaian IKU pada Tahun 2023 berdasarkan Nota Dinas Biro Keuangan Nomor 84/SJ.2/RC.610/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Triwulan IV Tahun 2023 diketahui bahwa Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat BRSDM sebesar 83,72 atau 102,10% dari target yang ditetapkan sebesar 82.

Tabel 20. Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat BRSDM (nilai)

IKU-12. Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat BRSDM (nilai)								
Realisasi Tahun			Tahun 2023			% Kenaikan Tahun 2022-2023	Renstra BPPSDM (2020 - 2024)	
2020-2022			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thd target 2024
2020	2021	2022						
91,62	85,86	87,27	82	83,72	102,10	-4,07	89	94,07

Realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan -4,07% dibandingkan Tahun 2022. Nilai tersebut bahkan menjadi yang terendah sejak Tahun 2020. Capaian tersebut juga masih di bawah target renstra sebesar 89. Nilai konsistensi dan efisiensi menjadi faktor turunnya Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023. Sehingga perlu reformulasi kebijakan pengelolaan anggaran agar nilai kinerja anggaran dapat ditingkatkan setidaknya menyamai target renstra sebesar 89. Pengelola anggaran perlu memastikan bahwa pada Tahun 2024 penyerapan anggaran perlu diikuti dengan keterserapan capaian rincian output yang setidaknya sesuai dengan target, yang di dukung dengan konsistensi dan efisiensi penggunaan anggaran. Hal ini juga harus di dukung oleh seluruh pegawai sekretariat BRSDM agar NKA dapat memenuhi target yang ditetapkan pada Tahun 2024. Upaya upaya yang harus dilakukan antara lain: masing-masing penanggung jawab IKU mengawal capaian dan membangun komunikasi efektif dengan pimpinan supaya hambatan hambatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran dapat diselesaikan dengan baik.

INDIKATOR KINERJA 13

Tingkat Kepatuhan BMN BPPSDM (%)

IKU Tingkat Kepatuhan BMN BPPSDM (%) merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup BPPSDM telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat Kepatuhan BMN BPPSDM (%) diukur atas 5 komponen yaitu:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (bobot 12,5%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan III tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 (bobot 25%);
4. Penggunaan BMN Hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST/Berita Acara Pemakaian) (bobot 25%);
5. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan pada Tahunan dengan polarisasi *maximize*. Realisasi capaian IKU ini pada Tahun 2023 berdasarkan Surat Inspektur Jenderal Nomor B.473/ITJ/HP.360/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Hasil Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara lingkup BPPSDMKP Tahun 2023, sebesar 90 % atau 116,13 % dari target yang ditetapkan sebesar 77,5 %. Realisasi tersebut sama dengan Tahun 2022 dan dianggap konsisten menjaga kinerja pengelolaan BMN.

Tabel 21. Capaian Kinerja Tingkat Kepatuhan BMN BPPSDM (%)

IKU-13. Tingkat Kepatuhan BMN BPPSDM (%)								
Realisasi Tahun			Tahun 2023			% Kenaikan Tahun 2022-2023	Renstra BPPSDM (2020 - 2024)	
2020-2022			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thd target 2024
2020	2021	2022						
98	77,5	90	77,5	90,00	116,13	0	72,5	120

Keberhasilan pencapaian IKU ini disebabkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan BMN yang akuntabel serta dukungan kepala satuan kerja lingkup BPPSDM yang secara aktif mengikuti arahan dan pendampingan terkait penetapan status penggunaan dan penghapusan BMN. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator ini meliputi percepatan penetapan status penggunaan dan penghapusan BMN lingkup BPPSDM serta Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) lingkup BPPSDM yang dilaksanakan setiap tahun dengan *output* RKBMN Pemeliharaan dan RKBMN Pengadaan 2 tahun kedepan. Upaya tersebut di dukung oleh kegiatan penyusunan laporan keuangan dan BMN Tahun 2023, Bimbingan Teknis pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Negara Tahun 2025.

INDIKATOR KINERJA 14

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPSDM (%)

IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPSDM (%), merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengadaan Barang/Jasa lingkup BPPSDM yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terdapat 6 komponen penilaian yang terdiri atas: (1). Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Strategis (10%); (2). Perencanaan dan Persiapan Pengadaan (15%); (3). Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui SPSE (10%); (4). Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (45%); (5). Laporan Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa (5%); (6). Persentase tindak lanjut rekomendasi

hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I Triwulan I s.d. Triwulan III Tahun 2023 (15%).


Periode pengukuran pada IKU ini yaitu tahunan dengan polarisasi maximize. Realisasi capaian IKU ini pada Tahun 2023 berdasarkan Surat Inspektur Jenderal Nomor B.482/ITJ/HP.350/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 tentang Hasil Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BPPSDMKP Tahun 2023, sebesar 88,00 % atau 113,55 % dari target yang ditetapkan sebesar 77,5 %. Capaian tersebut mengalami penurunan 0,74% dibandingkan Tahun 2022, meskipun capaian tersebut masih memenuhi target renstra pada Tahun 2024 yaitu 72,5% atau 120%.

Tabel 22. Capaian Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPSDM (%)

IKU-14. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPSDM (%)								
Realisasi Tahun			Tahun 2023			% Kenaikan Tahun 2022-2023	Renstra BPPSDM (2020 - 2024)	
2020-2022			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thd target 2024
2020	2021	2022						
100	75,40	88,66	77,5	88,00	113,55	-0,74	72,5	120

Keberhasilan pencapaian IKU ini pada Tahun 2023 didukung oleh kegiatan penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa (RUP) & Tender Dini (T-1) TA 2022 lingkup BPPSDM dan penyampaian laporan progress pelaksanaan PBJ TA 2022 lingkup BPPSDM pada setiap akhir bulan. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian antara lain: rapat-rapat koordinasi dengan Kepala Satker, PPK, dan Pokja PBJ dalam percepatan pelaksanaan PBJ lingkup BRSDM KP, yang dilaksanakan setiap awal bulan.

Hambatan yang perlu menjadi perhatian penanggung jawab IKU tersebut meliputi keterlambatan dokumen kontraktual pada SUPM kota Agung terkait pengadaan Docking Kapal Latih Bawal Putih III dan Renovasi Asrama. Selain itu, keterlambatan juga terjadi di Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) dimana sebanyak 4 proyek pengerjaan tidak diselesaikan tepat waktu yaitu atau 84,00% paket pengadaan Docking kapal latih bawal putih III, Renovasi Gedung Direktorat, Auditorium Madidihang dan VIP Politeknik Ahli Usaha Perikanan



(AUP) Tahun Anggaran 2023, Renovasi Asrama Aster Baru dan Aster Lama Politeknik AUP Tahun Anggaran 2023, dan Renovasi Gerbang Kampus Politeknik AUP. Hal tersebut perlu menjadi evaluasi menyeluruh baik bagi pihak penyelenggara PBJ satuan kerja maupun sekretariat BPPSDM. Perlu dibangun *early warning system* berbasis teknologi informasi agar keterlambatan-keterlambatan tersebut dapat di minimalisir pada Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA 15

Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPSDM (%)

IKU ini didefinisikan sebagai jumlah peraturan perundang-undangan lingkup BPPSDM yang dapat diselesaikan (sampai dengan proses penyampaian permohonan pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Hukum dan HAM atau penyampaian penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri) hingga 30 Juni 2023, dibandingkan dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 84 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.


Periode pengukuran capaian IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPSDM (%) adalah semesteran dengan polarisasi *maximize*. Berdasarkan matriks program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023, BPPSDM mempunyai target penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan pada Semester II sebanyak 6 produk hukum. Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Hukum 29/SJ.4/TU.210/I/2024 tanggal 2 Januari 2024, terdapat 6 (enam) peraturan yang telah berhasil diselesaikan atau telah mencapai proses harmonisasi, yaitu:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2023 Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2023 Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengolah Udang.
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan.
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan

Tabel 23. Capaian Kinerja Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPSDM (%)

IKU-15. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPSDM (%)								
Realisasi Tahun			Tahun 2023			% Kenaikan Tahun 2022-2023	Renstra BPPSDM (2020 - 2024)	
2020-2022			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thd target 2024
2020	2021	2022						
-	-	100	100	100	100	-	-	-

Keberhasilan atas pencapaian IKU ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan dan kontribusi seluruh pegawai dalam menuntaskan setiap tahapan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini antara lain: rapat-rapat koordinasi dalam rangka pembahasan peraturan, pembagian tugas dan tanggung jawab yang



jelas antara Sekretariat dan Pusat serta kegiatan advokasi dan asistensi yang dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal KKP.

INDIKATOR KINERJA 16

Nilai PNBP BPPSDM (Rupiah Miliar)

Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Persentase Realisasi PNBP BPPSDM dapat di monitor melalui aplikasi OM SPAN . Rincian realisasi pada aplikasi OM SPAN sebagai berikut:

1. Penerimaan Fungsional berupa pendapatan penjualan hasil pertanian perkebunan peternakan dan budidaya, pendapatan penjualan hasil produksi non litbang lainnya, pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi, pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standarisasi lainnya, pendapatan biaya pendidikan; pendapatan layanan pendidikan dan/atau pelatihan, Pendapatan royalty atas kekayaan intelektual, Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan;
2. Penerimaan Umum berupa pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin, pendapatan dari pemindaan BMN lainnya, pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan, pendapatan PPN dalam negeri, penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu, penerimaan kembali

belanja barang tahun anggaran yang lalu, penerimaan kembali persekot/uang muka gaji;


3. Penerimaan BLU berasal dari pendapatan jasa layanan pendidikan, pendapatan jasa pelayanan tenaga pekerjaan informasi pelatihan dan teknologi, pendapatan penyediaan barang, pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya, pendapatan jasa layanan perbankan BLU, pendapatan lain-lain BLU, pendapatan BLU lainnya dari sewa ruangan, pendapatan BLU lainnya dari sewa peralatan dan mesin, pendapatan BLU lainnya dari sewa lainnya.

Target PNBPN BPPSDM tahun 2023 adalah sebesar Rp24.731.913.000,00 dengan target fungsional sebesar Rp12.751.590.000,00 dan target umum sebesar Rp448.314.000,00 serta target BLU sebesar Rp11.532.009.000,00. Periode pengukuran capaian IKU adalah tahunan dengan polarisasi *maximize*. Realisasi capaian IKU ini berdasarkan Nota dinas Nomor B.257/BPPSDM.1/KU.340/I/2024 tanggal 11 Januari 2023 tentang Capaian Realisasi PNBPN dan BLU BPPSDM TA 2023 adalah sebesar 32,056 Milliar Rupiah atau sebesar 120% dari target 24,731 Milliar Rupiah. Realisasi tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 74,41% dibandingkan capaian Tahun 2022

Tabel 24. Capaian Kinerja Nilai PNBPN BPPSDM (Rupiah Miliar)

IKU-16. Nilai PNBPN BPPSDM (Rupiah Miliar)								
Realisasi Tahun			Tahun 2023			% Kenaikan Tahun 2022-2023	Renstra BPPSDM (2020 - 2024)	
2020-2022			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thd target 2024
2020	2021	2022						
12,56	-	18,38	24,731	32,056	120	74,41	-	-

Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pencapaian IKU adalah; 1). Melakukan monitoring PNBPN di lingkup BPPSDM, dengan melakukan Rapat berkala untuk membahas progress capaian PNBPN, 2). Potensi dari penetapan BPPP Tegal sebagai satker dengan sistem pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, sehingga dapat memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana



yang dimiliki dalam meningkatkan PNBPN, 3). Adanya lelang penghapusan aset barang milik negara, 4) Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan pihak luar untuk menghasilkan PNBPN, 5). Memberlakukan tarif biaya pendidikan sesuai peraturan yang berlaku dan 6). Membuat program program inovatif (salah satunya melalui *teaching factory*) untuk meningkatkan pendapatan PNBPN.

INDIKATOR KINERJA 17

Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup BPPSDM (orang)

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat/operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik di sektor kelautan dan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran produk perikanan, pengelolaan ruang laut, penyuluhan pelatihan serta karantina ikan. Capaian IKU ini diambil dari data Jumlah Penyuluh Perikanan Bantu, Jumlah Penyuluh Perikanan Swadaya, Jumlah Pengelola Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Jumlah Pusat Pelatihan Mandiri KP dengan target sebesar 12.342 orang pada Tahun 2023. Periode pengukuran capaian IKU adalah tahunan dengan polarisasi *maximize*.

Berdasarkan nota penyampaian data dukung Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan tanggal 11 Januari 2024 diketahui bahwa tenaga kerja yang terlibat pada sektor BPPSDM sebesar 12.519 orang atau 101,43% dari target. Realisasi tersebut turun 17,75% dari Tahun 2022. Namun demikian, capaian IKU ini masih memenuhi target yang ditetapkan pada Tahun 2023. Meskipun perlu memperhatikan nilai anggaran yang dikeluarkan supaya tidak mempengaruhi efisiensi pelaksanaan program.

Tabel 25. Capaian Kinerja Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup BPPSDM (orang)

IKU-17. Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup BPPSDM (orang)								
Realisasi Tahun			Tahun 2023			% Kenaikan Tahun 2022-2023	Renstra BPPSDM (2020 -2024)	
2020-2022			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thd target 2024
2020	2021	2022						
-	-	15.221	12.342	12.519	101,43	-17,75	-	-

Upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam rangka menunjang pencapaian target antara lain: penerbitan SK penyuluh perikanan bantu, penetapan P2MKP dan kegiatan penyuluhan terhadap UMKM sektor kelautan dan perikanan. Kehadiran UMKM sebagai pendukung program merupakan komitmen nyata dari BPPSDM untuk memaksimalkan potensi ekonomi (mayoritas pelaku usaha kelautan dan perikanan merupakan UMKM) serta pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan.

INDIKATOR KINERJA 18

Kerja Sama Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati (Kesepakatan)

Kerja sama Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang disepakati (Kesepakatan) didefinisikan sebagai jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama BPPSDM yang terbentuk, disepakati, dan ditindaklanjuti pada tahun berjalan. Periode pengukuran IKU ini adalah tahunan dengan polarisasi *maximize*. Target yang ditetapkan pada Tahun 2023 adalah 45 dokumen kerja sama yang dihasilkan.

Realisasi capaian IKU pada Tahun 2023 sebesar 50 dokumen atau 111,11% dibandingkan target Tahun 2023. Dokumen kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen antara BPPSDM dengan *government bodies*, Institusi Pendidikan, *non government organisation* maupun DUDI untuk

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia kelautan dan perikanan guna mendukung tercapainya ekosistem kelautan dan perikanan berkelanjutan.

Tabel 26. Capaian Kinerja Kerja Sama Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati (Kesepakatan)

IKU-18. Kerja Sama Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati (Kesepakatan)								
Realisasi Tahun			Tahun 2023			% Kenaikan Tahun 2022-2023	Renstra BPPSDM (2020-2024)	
2020-2022			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thd target 2024
2020	2021	2022						
40	82	42	45	50	111,11	11,11	75	66,67

Capaian tahun 2023 mengalami kenaikan 11,11% dibandingkan Tahun 2022. Kenaikan capaian tersebut dikarenakan adanya upaya dari pelaksana IKU untuk memperluas jejaring kerja sama dengan pihak pemerintah, institusi Pendidikan, NGO, serta DUDI. Kerja sama tersebut merupakan akses untuk membuka peluang dalam hal peningkatan kualitas SDM kelautan dan perikanan, bantuan permodalan, penguatan kelembagaan, pendampingan wirausaha, serta peningkatan keterserapan lulusan Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan atau Balai Pelatihan dan Penyuluhan ke dalam Dunia Kerja. Namun demikian, jika dibandingkan dengan target 2024, realisasi Tahun 2023 hanya mencapai 66,67% dari target yang ditetapkan. Hal ini menjadi catatan bagi penanggung jawab IKU untuk terus memperluas akses kerja sama baik vertikal maupun horizontal.

INDIKATOR KINERJA 19

Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati (%)

IKU Persentase tindak lanjut kerjasama riset dan sumberdaya manusia KP yang telah disepakati merupakan rasio implementasi kerja sama riset dan sumber daya manusia kelautan dan perikanan dengan jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan internasional yang telah disepakati dan masih berlaku

pada tahun sebelumnya. Pengukuran capaian IKU ini dilakukan Tahunan dengan polarisasi *maximize*.

Berdasarkan hasil pengukuran dari Biro Perencanaan diketahui bahwa Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati adalah sebesar 75,85 atau 105,35% dibandingkan target Tahun 2023. Capaian tersebut didapatkan berdasarkan nilai efektifitas kerja sama dalam mendukung *outcome*. Realisasi Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 6,79% dibandingkan Tahun 2022. Data tersebut menyiratkan bahwa kualitas kerja sama pada Tahun 2023 lebih baik dibandingkan Tahun 2022.

Tabel 27. Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati (%)

IKU-19. Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati (%)								
Realisasi Tahun			Tahun 2023			% Kenaikan Tahun 2022-2023	Renstra BPPSDM (2020 -2024)	
2020-2022			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thd target 2024
2020	2021	2022						
-	-	71,03	72	75,85	105,35	6,79	-	-

Keberhasilan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, namun juga dipengaruhi faktor eksternal. Sinergitas antara kedua belah pihak dalam mengimplementasikan lingkup kerja sama yang telah disepakati menjadi katalis dalam menghasilkan *outcome*. Jika seluruh kerja sama yang disepakati menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan rencana, maka dampak pertumbuhan sosial dan ekonomi bagi masyarakat kelautan dan perikanan dapat dirasakan secara menyeluruh.

Kegiatan lainnya yang menjadi pendukung ketercapaian indikator ini antara lain: 1. Inventarisasi dokumen kerja sama riset dan sumber daya manusia kelautan dan perikanan antar lembaga dan internasional yang telah disepakati dan masih berlaku pada tahun sebelumnya; serta, 2. Monitoring dan evaluasi implementasi kerja sama riset dan sumber daya manusia kelautan dan

perikanan antar lembaga dan internasional yang telah disepakati dan masih berlaku pada tahun sebelumnya;

INDIKATOR KINERJA 20


Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Sekretariat BRSDM (%)

Layanan dukungan manajemen internal Sekretariat BRSDM terdiri dari 12 layanan yang meliputi: (1). Pelayanan perencanaan dan penganggaran internal, (2). Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Riset dan SDM KP; (3). Pelayanan Pelaporan Kinerja Riset dan SDM KP; (4). Pelayanan Keuangan Riset dan SDM KP; (5). Pelayanan Pengelolaan BMN Riset dan SDM KP; (6). Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Riset dan SDM KP; (7). Pelayanan Kerjasama Riset dan SDM KP; (8). Pelayanan Kehumasan Riset dan SDM KP; (9). Pelayanan Data Riset dan SDM KP; (10). Pelayanan Perencanaan dan Pengembangan SDMA Riset; (11). Pelayanan Jabatan Fungsional Riset dan SDM KP; (12). Pelayanan Hukum dan Organisasi Riset dan SDM KP. Pengukuran IKU ini dilakukan setiap Triwulanan dengan polarisasi *maximize*.

Tabel 28. Capaian Kinerja Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Sekretariat BRSDM (%)

IKU-20. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Sekretariat BRSDM (%)								
Realisasi Tahun			Tahun 2023			% Kenaikan Tahun 2022-2023	Renstra BPPSDM (2020 -2024)	
2020-2022			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thd target 2024
2020	2021	2022						
-	100	100	100	100	100	-	100	100

Berdasarkan tabel 28 diketahui bahwa realisasi capaian IKU sebesar 100 % dari target 100 %. Capaian tersebut konsisten sejak Tahun 2021 dan tidak mengalami perubahan. Keberhasilan tercapainya indikator kinerja persentase layanan dukungan manajemen internal Sekretariat BRSDM, antara lain disebabkan oleh: (1). Komunikasi yang baik dan rutin dengan unit kerja lingkup BPPSDM; (2). Pelaksanaan kegiatan dengan mengacu pada ROK yang telah



ditetapkan, dan (3). Komitmen penanggung jawab kegiatan terhadap tugas dan tanggung jawab dalam bentuk ketersediaan dokumen output pelaksanaan kegiatan. Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU meliputi 12 layanan dukungan manajemen mulai dari pelayanan perencanaan dan penganggaran internal sampai dengan pelayanan hukum dan organisasi riset dan SDM KP yang didukung oleh ketersediaan anggaran.

INDIKATOR KINERJA 21

Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDM yang Ditangani (%)

IKU ini didefinisikan sebagai jumlah permasalahan hukum yang di advokasi dan di tangani oleh Sekretariat BRSDM yang berkaitan dengan kepentingan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri KP Nomor 15 Tahun 2002 tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai dengan akhir tahun 2023. Kegiatan advokasi hukum diperoleh dari prosentase perhitungan jumlah permasalahan hukum berupa kegiatan konsultasi hukum, pendampingan hukum, dan penyelesaian perkara hukum yang ditangani dibandingkan dengan permasalahan hukum yang dimintakan/dimohonkan untuk advokasi baik kepada unit kerja lingkup BRSDM maupun kepada seluruh pegawai aktif maupun yang telah purna tugas

Berdasarkan matriks permasalahan hukum di lingkungan BPPSDM Tahun 2023, Ditetapkan target sebanyak 4 (empat) kasus hukum yang harus diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2023. Periode pengukuran IKU ini yaitu Tahunan dengan polarisasi *maximize*. Permasalahan hukum yang sampai saat ini telah ditangani oleh BPPSDM KP meliputi permasalahan aset tanah dan bangunan rumah negara, aset tanah lokasi satuan kerja, dan pekerjaan pengadaan barang dan jasa antara lain:

1. Permasalahan tanah dan bangunan rumah negara golongan II pada satuan kerja di lingkup BPPSDM KP;

2. Permasalahan kepemilikan atas sebidang tanah bekas hak *Eigendom verponding* pada satuan pendidikan KP di lingkup BPPSDM KP;
3. Pekerjaan pengadaan bangunan gedung akuarium di Jawa Barat dan Maluku Tenggara; dan
4. Pekerjaan pengadaan bangunan gedung pendidikan.

IKU Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDM yang Ditangani (%) merupakan IKU yang baru muncul di Tahun 2023. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelayanan dan perlindungan di bidang hukum bagi seluruh pegawai BPPSDM. Selain itu, perlindungan hukum terhadap *asset* yang dimiliki oleh BPPSDM juga menjadi konsen yang perlu ditangani secara menyeluruh karena berdampak pada keterlaksanaan program-program teknis di lingkup BPPSDM. Tegaknya supremasi hukum merupakan salah satu prinsip *good governance* yang diikuti dengan Kepastian hukum (*legal certainty*), Hukum yang responsip, Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif serta Indepedensi peradilan.

Tabel 29. Capaian Kinerja Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDM yang Ditangani (%)

IKU-21. Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDM yang Ditangani (%)								
Realisasi Tahun			Tahun 2023			% Kenaikan Tahun 2022-2023	Renstra BPPSDM (2020 - 2024)	
2020-2022			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thd target 2024
2020	2021	2022						
-	-	-	100	100	100	-	-	-

Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini antara lain:

1. Pendampingan oleh Sekretariat BPPSDM kepada pegawai BPPSDM yang menghadapi pemeriksaan oleh aparat penegak hukum;
2. Pendampingan oleh Sekretariat BRSDM dalam beracara di depan persidangan baik di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung;
3. Pendampingan oleh Sekretariat BRSDM dalam pengosongan dan pengamanan aset tanah dan bangunan rumah negara golongan II; dan

4. Penyusunan materi gugatan, jawaban/kontra memori jawaban, bukti, dan kesimpulan yang dilakukan bersama dan mendapatkan dukungan dari Sekretariat Jenderal KKP, Kejaksaan Agung, Advokat, aparat penegak hukum, serta unit kerja eselon II terkait lingkup BPPSDM;

INDIKATOR KINERJA 22

Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPPSDM (Nilai)


Indikator Kinerja Utama Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPPSDM (Nilai) merupakan Indikator pengukuran seberapa informatif sebuah organisasi. Keterbukaan informasi publik adalah prinsip yang mendorong pemerintah untuk menyediakan akses terbuka dan transparan terhadap informasi publik kepada masyarakat. Prinsip ini diyakini dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.

Periode pengukuran capaian IKU ini dilakukan Tahunan dengan polarisasi *maximize*. Berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi Biro Perencanaan, BPPSDM mendapatkan nilai sebesar 100 atau 111,11% dari target Tahun 2023. IKU ini merupakan IKU baru di Tahun 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan secara historis dengan Tahun sebelumnya.

Tabel 30. Capaian Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPPSDM (Nilai)

IKU-22. Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPPSDM (Nilai)								
Realisasi Tahun			Tahun 2023			% Kenaikan Tahun 2022-2023	Renstra BPPSDM (2020 -2024)	
2020-2022			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thd target 2024
2020	2021	2022						
-	-	-	90	100	111,11	-	-	-

Keberhasilan ketercapaian target pada IKU ini tidak terlepas dari bagaimana BPPSDM memanfaatkan media digital sebagai sarana untuk perluasan informasi. BPPSDM memiliki akun instagram (@BPPSDM_KP) yang



diikuti oleh 15,6 Ribu pengikut dan akun X (@BPPSDM_KP) yang diikuti oleh 13,8 Ribu pengikut sehingga memudahkan dalam perluasan informasi kepada masyarakat. Kegiatan pendukung lainnya, yang telah dilakukan dalam upaya mencapai target IKU tersebut meliputi:

1. *Sharing Session* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada 23 Juni 2023
2. Workshop Petunjuk Pengisian Kuesioner Monev Keterbukaan Informasi Informasi Publik di lingkup KKP pada 22 Agustus 2023
3. Pendampingan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh BHKLN Setjen KKP pada 30 Agustus 2023
4. Workshop dan penilaian kuesioner (SAQ) Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan pada 4-6 September
5. Workshop Monev Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan pada 11 September 2023

SASARAN KEGIATAN 2

Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal Sekretariat BRSDM

Pencapaian kinerja sasaran kegiatan “Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal Sekretariat BRSDM” didukung 1 (satu) indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut yaitu:

INDIKATOR KINERJA 23

Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Sekretariat BRSDM tepat waktu (%)

Pemenuhan layanan sarana dan prasarana Sekretariat BRSDM merupakan indikator yang menggambarkan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja Sekretariat BRSDM. Sarana dan Prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan pelaksanaan program sehingga diperlukan komitmen untuk memenuhi seluruh kebutuhan sarana dan prasarana yang termaktub pada Rencana Umum Pengadaan (RUP). Periode pengukuran capaian IKU ini adalah Tahunan dengan polarisasi *maximize*. Adapun capaian IKU tersebut sebagai berikut:

Tabel 31. Capaian Kinerja Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Sekretariat BRSDM tepat waktu (%)

IKU-23. Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Sekretariat BRSDM tepat waktu (%)								
Realisasi Tahun			Tahun 2023			% Kenaikan Tahun 2022-2023	Renstra BPPSDM (2020 -2024)	
2020-2022			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thd target 2024
2020	2021	2022						
-	-	100	100	100	100	-	-	-

Faktor mendukung keberhasilan ketercapaian IKU adalah adanya harmonisasi antara perencanaan (melalui aplikasi SIRUP) dengan realisasi di lapangan sehingga seluruh target yang direncanakan dapat diselesaikan dengan baik. Upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam rangka pencapaian IKU meliputi pengawasan terhadap ketersediaan alokasi anggaran (menghindari anggaran minus), ketepatan pekerjaan, serta manajemen waktu penyelesaian proyek.

SASARAN KEGIATAN 3

Terpenuhinya Layanan Perkantoran Sekretariat BRSDM

Pencapaian kinerja sasaran kegiatan "Terpenuhinya Layanan Perkantoran Sekretariat BRSDM" didukung 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut yaitu :

INDIKATOR KINERJA 24

Persentase Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Sekretariat BRSDM tepat waktu (%)

Indikator ini menunjukkan tingkat pelayanan kesekretariatan terhadap pemenuhan hak pegawai. Formulasi yang digunakan untuk penghitungan IKU ini adalah pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai Sekretariat BRSDM, Pusat Pendidikan KP, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang dibayarkan tepat waktu. Kategori tepat waktu diimplementasikan dalam bentuk pembayaran gaji yang dilaksanakan pada tanggal pertama hari kerja bulan berjalan. Sementara untuk pembayaran tunjangan kinerja dilaksanakan sebelum tanggal 15 bulan berikutnya. Periode pengukuran IKU ini adalah triwulanan dengan polarisasi *maximize*.

Tabel 32. Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Sekretariat BRSDM tepat waktu (%)

IKU-24. Persentase Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Sekretariat BRSDM tepat waktu (%)								
Realisasi Tahun			Tahun 2023			% Kenaikan Tahun 2022-2023	Renstra BPPSDM (2020 - 2024)	
2020-2022			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thd target 2024
2020	2021	2022						
-	-	100	100	100	100	-	-	-

Realisasi pada IKU ini mencapai 100% dari target. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022, tidak terdapat perubahan pada realisasi tersebut. Pencapaian IKU ini tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara tim

keuangan dengan tim kepegawaian terkait pemutakhiran data pegawai. Dukungan eksternal melalui koordinasi intensif dengan tim KPPN terkait penggunaan aplikasi GPP, Tunjangan kinerja dan aplikasi SAKTI juga berpengaruh terhadap ketercapaian IKU. Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini antara lain: pemantauan rutin oleh tim kepegawaian terhadap dokumentasi presensi masing-masing pegawai yang dijadikan dasar dalam pemberian besaran Gaji dan Tunjangan Kinerja oleh TIMJA keuangan Sekretariat BRSDM.

INDIKATOR KINERJA 25


Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran Sekretariat BRSDM tepat waktu (%)

Kegiatan layanan perkantoran dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari perkantoran, penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran serta pelaksanaan tugas Pimpinan. Kegiatan tersebut perlu di dokumentasikan menjadi Laporan Bulanan yang menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pimpinan. Periode pengukuran IKU ini adalah Triwulanan dengan polarisasi *maximize*.

Tabel 33. Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran Sekretariat BRSDM tepat waktu (%)

IKU-25. Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran Sekretariat BRSDM tepat waktu (%)								
Realisasi Tahun			Tahun 2023			% Kenaikan Tahun 2022-2023	Renstra BPPSDM (2020 -2024)	
2020-2022			Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian thd target 2024
2020	2021	2022						
-	-	100	100	100	100	-	-	-

Realisasi pada capaian kinerja IKU ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% dari target yang ditetapkan. Capaian IKU pemenuhan layanan perkantoran lingkup BPPSDM pada triwulan IV didukung oleh 3 (tiga) laporan layanan perkantoran. Secara kumulatif jumlah dokumen layanan



perkantoran dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebanyak 12 (sembilan) laporan, yang terdiri dari :

1. Laporan kegiatan layanan perkantoran Triwulan I, sebanyak 3 (tiga) dokumen, yaitu Laporan bulan Januari, Februari, dan Maret 2023 meliputi pembayaran operasional dan pemeliharaan perkantoran.
2. Laporan kegiatan layanan perkantoran Triwulan II, sebanyak 3 (tiga) dokumen, yaitu Laporan bulan April, Mei, dan Juni 2023 meliputi pembayaran operasional dan pemeliharaan perkantoran.
3. Laporan kegiatan layanan perkantoran Triwulan III, sebanyak 3 (tiga) dokumen, yaitu Laporan bulan Juli, Agustus, dan September 2023 meliputi pembayaran operasional dan pemeliharaan perkantoran.
4. Laporan kegiatan layanan perkantoran Triwulan IV, sebanyak 3 (tiga) dokumen, yaitu Laporan bulan Oktober, November, dan Desember 2023 meliputi pembayaran operasional dan pemeliharaan perkantoran.

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target IKU ini antara lain:

- a. Pembayaran operasional perkantoran tepat waktu.
- b. Pemeliharaan perkantoran tepat waktu sesuai target.
- c. Monitoring rutin dan koordinasi dengan verifikator keuangan terkait keabsahan kuitansi.
- d. Koordinasi antara penanggungjawab dengan pelaksana kegiatan secara rutin.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan rekapitulasi data OM SPAN sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, pagu anggaran Sekretariat BRSDM (final) Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 60.147.190.000,-. Realisasi anggaran Sekretariat BPPSDM sebesar Rp. 58.585.055.024,- atau sebesar 97,40% yang terdiri

dari belanja pegawai dari anggaran sebesar Rp. 11.216.788.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 11.085.502.917,- atau sebesar 98,83%, belanja barang Non operasional anggaran sebesar Rp 22.800.000.000,- terealisasi sebesar Rp 22.526.186.670,- atau sebesar 98,80%, belanja barang operasional dari anggaran sebesar Rp. 22.854.402.000,- terealisasi sebesar Rp. 21.705.309.658,- atau 94,97% dan belanja modal sebesar Rp 3.276.000.000,- terealisasi sebesar Rp 3.268.055.779,- atau sebesar 99,76 %, dengan rincian sebagai berikut :


Tabel 34. Realisasi Anggaran Lingkup Sekretariat BRSDM Tahun 2023

PAGU SEKRETARIAT							
Jenis Belanja		Pagu	Blokir	Pagu Bersih	Realisasi	%	Sisa
51	Belanja Pegawai	11.216.788.000	-	11.216.788.000	11.085.502.917	98,83	131.285.083
52	Belanja Barang Non Ops	22.800.000.000	-	22.800.000.000	22.526.186.670	98,80	273.813.330
52	Belanja Ops Barang Ops	22.854.402.000	-	22.854.402.000	21.705.309.658	94,97	1.149.092.342
53	Belanja Modal	3.276.000.000	-	3.276.000.000	3.268.055.779	99,76	7.944.221
Total		60.147.190.000	-	60.147.190.000	58.585.055.024	97,40	1.562.134.976

Sumber: OMSPAN Kemenkeu, 9 Oktober 2023

Secara umum anggaran Sekretariat BRSDM dapat dimanfaatkan secara optimal dengan realisasi anggaran mencapai 97,40 %. Realisasi anggaran pada masing-masing IKU Sekretariat BRSDM s.d Triwulan IV tahun 2023, sebagaimana pada lampiran 2.

Dalam pelaksanaan anggaran s.d Triwulan IV tahun 2023, beberapa hal perlu mendapatkan perhatian yang merupakan kondisi yang mempengaruhi penyerapan anggaran, antara lain adanya keterlambatan ataupun kesalahan dalam penyiapan dokumen pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan menghambat proses pembayaran.



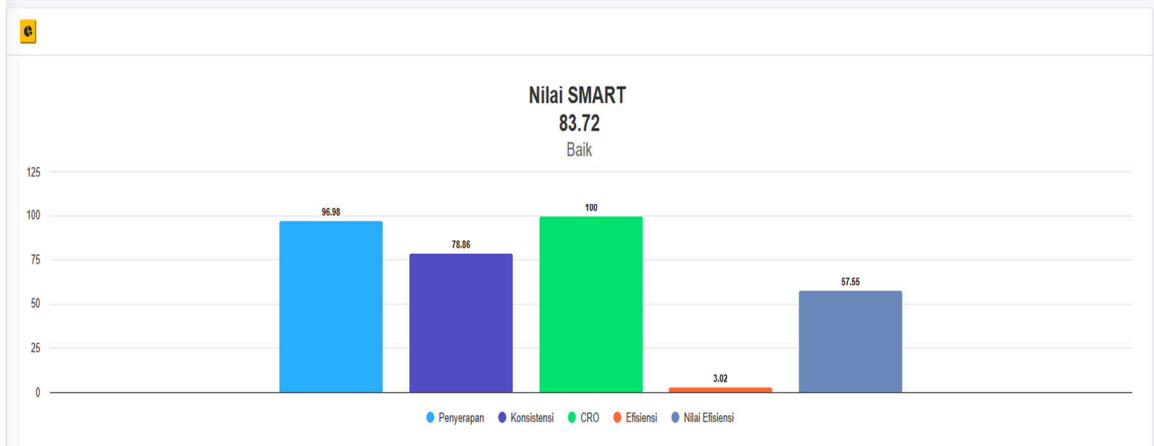
Secara umum kinerja Sekretariat BRSDM s.d Triwulan IV Tahun 2023 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan tercapai dengan baik. Namun demikian, dalam pelaksanaannya direkomendasikan demi peningkatan kinerja dan pelaksanaan anggaran diperlukan implementasi pelaksanaan operasional dan pemeliharaan kantor yang bersifat prioritas dilaksanakan di awal tahun anggaran.

D. EFISIENSI ANGGARAN DAN ALOKASI SUMBER DAYA SEKRETARIAT BRSDM

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga disebutkan bahwa evaluasi kinerja anggaran terdiri atas evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi, evaluasi kinerja anggaran atas aspek manfaat dan evaluasi kinerja atas aspek konteks. Efisiensi terdiri atas efisiensi keluaran (output) Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I/program dan efisiensi keluaran (output) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan.

Dalam rangka Laporan Kinerja BPPSDM s.d Triwulan IV Tahun 2023 penghitungan efisiensi data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran program dan efisiensi keluaran output kegiatan meliputi: data capaian keluaran program, data capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya.

Penghitungan nilai efisiensi ini telah tersedia berbasis sistem dan dikembangkan oleh Kementerian Keuangan RI melalui aplikasi Smart DJA, dengan hasil sebagai berikut:



Gambar 3. Efisiensi Sekretariat BRSDM Tahun 2023 berdasar penggunaan sumberdaya

Nilai efisiensi anggaran Sekretariat BRSDM per 31 Desember 2023, sebesar 83,72 dari target 82 dengan nilai penyerapan sebesar 96,98 , konsistensi sebesar 78,86, capaian rincian output sebesar 100 dan efisiensi sebesar 3,02, dan nilai efisiensi 57,55

Berdasarkan hasil penilaian SMART DJA, nilai efisiensi anggaran yang dikelola oleh Sekretariat BRSDM adalah 57,35. Nilai tersebut cukup memadai namun belum sebenarnya masih dapat dioptimalkan apabila rencana penggunaan dana diperbaharui secara berskala. Oleh sebab itu, perlu adanya pengendalian serta peningkatan ketertiban pegawai dalam implementasi penggunaan dana sesuai rencana, dan atau memperbaharui rencana penggunaan dana apabila terjadi penyesuaian nilai dan waktu penyerapan sehingga realisasi yang direncanakan dengan realisasi sebenarnya bertaut positif yang berpengaruh terhadap peningkatan nilai efisiensi anggaran.





BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sekretariat BRSDM telah menyelesaikan seluruh program yang ditetapkan pada Tahun 2023. Program tersebut terdiri atas 3 (tiga) sasaran program yang meliputi Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat BRSDM, Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal dan Terpenuhinya Layanan Perkantoran. Sasaran program tersebut diturunkan menjadi 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja (IK) yang setiap IK didukung oleh anggaran yang proporsional.

Berdasarkan nilai NKO, Sekretariat BRSDM mendapatkan nilai 102,77 dengan predikat baik, dimana terdapat 17 IK berkinerja baik dan 8 IK berkinerja Istimewa. Adapun rincian NKO pada masing-masing IK disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 35. Capaian Kinerja Sekretariat BRSDM pada Masing-Masing Indikator Kinerja

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2023		
		Target	Capaian	%
1 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BRSDM	1 Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDM (unit)	15	16	106,67
	2 Unit kerja yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK Lingkungan BPPSDM (unit/Satker)	7	7	100
	3 Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM (%)	≤0,5	0	120
	4 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Sekretariat BRSDM (indeks)	81	87,93	108,56
	5 Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM (nilai)	80,5	84,33	104,76
	6 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat BRSDM (Nilai)	93	95,94	103,16
	7 Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM (nilai)	3,1	3,8	120


SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		Tahun 2023		
			Target	Capaian	%
	8	Persentase Unit kerja Sekretariat BRSDM yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92	116,58	120
	9	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat BRSDM (%)	80	80,95	101,19
	10	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM (%)	75	81,52	108,69
	11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat BRSDM (nilai)	93,75	92,37	98,53
	12	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat BRSDM (nilai)	82	83,72	102,10
	13	Tingkat Kepatuhan BMN BPPSDM (%)	77,5	90,00	116,13
	14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPSDM (%)	77,5	88,00	113,55
	15	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPSDM (%)	100	100	100
	16	Nilai PNBPN BPPSDM (Rupiah Miliar)	24,731	32,06	120
	17	Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup BPPSDM (orang)	12.342	12.519	101,43
	18	Kerja Sama Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati (Kesepakatan)	45	50	111,11
	19	Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati (%)	72	75,85	105,35
	20	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Sekretariat BRSDM (%)	100	100	100
	21	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDM yang Ditangani (%)	100	100	100
	22	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPPSDM (Nilai)	90	100	111,11

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2023				
		Target	Capaian	%		
2	Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal Sekretariat BRSDM	23	Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Sekretariat BRSDM tepat waktu (%)	100	100	100
3	Terpenuhinya Layanan Perkantoran Sekretariat BRSDM	24	Persentase Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Sekretariat BRSDM tepat waktu (%)	100	100	100
		25	Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran Sekretariat BRSDM tepat waktu (%)	100	100	100

B. REKOMENDASI

Capaian kinerja di Tahun 2023 dikategorikan baik berdasarkan Nilai Kinerja Organisasi. Namun demikian, terdapat capaian IK yang masih perlu ditingkatkan meliputi:

1. Unit Pelaksana Teknis pada lingkup BPPSDM yang belum mendapatkan predikat ZI WBK, perlu diberikan assistensi yang intensif dari Sekretariat BRSDM khususnya bagi UPT yang sudah dianggap memenuhi syarat WBK namun belum di rekomendasikan.
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Tahun 2023 belum memenuhi target akibat rendahnya nilai Deviasi Hal III DIPA. Pengelola keuangan perlu membangun komunikasi efektif dengan timja perencanaan agar nilai IKPA pada tahun 2024 dapat ditingkatkan
3. Peningkatan nilai rekonsiliasi kinerja yang merupakan *quick assessment* terhadap SAKIP instansi. Jika nilai rekonsiliasi terjaga, maka seluruh rangkaian pelaksanaan program dapat dijaga kualitasnya.
4. Peningkatan nilai efisiensi penggunaan anggaran pada Tahun 2024.

- 
5. Perluasan lingkup kerja sama dengan Kementerian/lembaga, NGO, Institusi Pendidikan dan DUDI.
 6. Percepatan pemenuhan data dukung pada setiap Indikator Kinerja. Reformasi birokrasi perlu diterapkan di Sekretariat BRSDM yang memiliki fungsi pendampingan dan pelayanan bagi UPT Level II dan III pada Lingkup BPPSDM.





LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rudi Alek Wahyudin**

Jabatan : Sekretaris Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **I Nyoman Radiarta**

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 November 2023

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama
Sekretaris Badan Riset dan
SDM Kelautan dan Perikanan


Rudi Alek Wahyudin

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KP**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BRSDM	1	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDM (unit)	15
		2	Unit kerja yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK lingkungan BPPSDM (unit/Satker)	7
		3	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM (%)	≤0,5
		4	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat BRSDM (indeks)	81
		5	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM (nilai)	80,5
		6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat BRSDM (Nilai)	93
		7	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM (nilai)	3,1
		8	Persentase Unit kerja Sekretariat BRSDM yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92
		9	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat BRSDM (%)	80
		10	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM (%)	75
		11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat BRSDM (nilai)	93,75
		12	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat BRSDM (nilai)	82
		13	Tingkat Kepatuhan BMN BPPSDM (%)	77,5

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPSDM (%)	77,5
		15	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPSDM (%)	100
		16	Nilai PNBP BPPSDM (Rupiah Miliar)	24,731
		17	Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup BPPSDM (orang)	12.342
		18	Kerja Sama Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati (Kesepakatan)	45
		19	Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati (%)	72
		20	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Sekretariat BRSDM (%)	100
		21	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDM yang Ditangani (%)	100
		22	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPPSDM (Nilai)	90
2	Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal Sekretariat BRSDM	23	Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Sekretariat BRSDM tepat waktu (%)	100
3	Terpenuhinya Layanan Perkantoran Sekretariat BRSDM	24	Persentase Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Sekretariat BRSDM tepat waktu (%)	100
		25	Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran Sekretariat BRSDM tepat waktu (%)	100

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat BRSDM	60.147.190.000
Total Anggaran Sekretariat Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan Tahun 2023		60.147.190.000

Jakarta, 30 November 2023

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama
Sekretaris Badan Riset dan SDM
Kelautan dan Perikanan


Rudi Alek Wahyudin